



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

LAKIP 2025

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN JEMBER



[www.dpppakb.jemberkab.go.id](http://www.dpppakb.jemberkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025

Jember, 29 September 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember



Drs. Moh. Djamil, M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19680924 198809 1 001

# DAFTAR HADIR

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR HADIR</b> .....	3
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	5
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	7
I. Latar Belakang.....	7
II. Maksud dan Tujuan.....	7
III. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.....	8
IV. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.....	12
• Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025.....	13
V. Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.....	13
• Tabel 1.2. Profil Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Per 3 September 2025. ....	14
VI. Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.....	16
• Tabel 1.4. Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025.....	17
VII. Isu Strategis.....	20
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	21
A. Rencana Strategis.....	22
• Tabel 2.1. Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. ....	22
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
• Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	23
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
• Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.....	23
D. Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2025.....	28

<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	29
<b>A.</b> Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2025 .....	29
<b>B.</b> Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.....	30
<b>C.</b> Analisis Program Kegiatan Yang Mendukung Sasaran .....	89
<b>D.</b> Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya.....	89
• Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025.....	89
<b>PENUTUP.</b> .....	<b>104</b>
Lampiran Pendukung.....	105

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2025 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025-2030 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2030, yang meliputi:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2025 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2025-2030, dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana ditahun 2025 ini mendapat predikat nilai sangat memuaskan. ( AA )

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Keluarga di tahun 2025 ini mendapat predikat nilai sangat memuaskan. . ( AA )

Sasaran 3 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah di tahun 2025 ini mendapat predikat nilai sangat memuaskan.

Capaian 3 indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember rata rata mencapai 102 % dan masuk dalam kategori AA ( Sangat Memuaskan ). Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025-2030

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan anggaran sebesar Rp31.144.597.721,00,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember, DAK NON FISIK BOKB, dan DAK BOPPA

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 30.999.097.721,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 145.500.000,-

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan september 2025 sebesar anggaran sebesar Rp31.144.597.721,00,- dan terserap sebesar Rp 5.551.536.359,00,- atau rata-rata capaian 17.83 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan September 2025 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 antara lain:

1. SDM yang sangat berkurang
2. Masih rendahnya APBD untuk pelayanan KB
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember masih mengandalkan anggaran DAK dari Pusat.
4. Beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan pada bulan februari sampai dengan Agustus karena adanya regulasi baru, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada akhir tahun sesuai arahan dan regulasi yang sudah ditetapkan

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain :

1. Tim TAPD menambah anggaran APBD untuk pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Penambahan Sumber Daya untuk mendukung terselenggaranya kegiatan sehingga dapat meningkatkan serapan anggaran
3. Melaksanakan kegiatan sesuai arahan dari pimpinan di sisa bulan untuk yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2025 dengan capaian serapan 84% di akhir tahun 2025

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **I. Latar Belakang**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2025

## **II. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **III. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember**

dudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 19 tahun 2025 sebagai berikut :

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang perngendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan;
- (5) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember terdiri dari:
  - a. Sekreatriat, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

## 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- c. Bidang Perlindungan Anak terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Pergerakan dan Informasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
- f. UPTD dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

## Tugas dan Fungsi

### 1. Sekretariat :

Tugas: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, dan keuangan di lingkungan dinas.
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, dan keuangan di lingkungan dinas.
  - c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas.
  - d. Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dinas.
  - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- ### 2. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, pengarusutamaan gender serta tugas lain dan yang diberikan oleh kepala dinas.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
- b. Perumusan pedoman teknis dan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.

- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
  - d. Pelaksanaan parameter pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender
  - e. Menyusun system informasi data gender dan data terpilah.
  - f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
  - g. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
  - h. Pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
  - i. Pelaksanaan fasilitasi jejaring pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pengarusutamaan gender.
  - j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
3. Bidang Perlindungan Anak

Tugas : merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan hak anak.
- b. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan hak anak.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan hak anak.
- d. Penyediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan.
- e. Memfasilitasi kegiatan kabupaten layak anak.
- f. Memfasilitasi pembuatan profil anak desa / kelurahan dan kecamatan.
- g. Memfasilitasi pembentukan gugus tugas desa / kelurahan layak anak dan forum anak kecamatan.
- h. Memfasilitasi pembentukan gugus tugas kecamatan layak anak dan forum anak kecamatan.
- i. Melaksanakan bimbingan teknis konvensi hak anak bagi lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha.
- j. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembentukan rumah ramah anak.
- k. Pengelolaan system data anak lingkup kabupaten.
- l. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembentukan pusat informasi sahabat anak.

- m. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembentukan ruang bermain ramah anak.
  - n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Penggerakan dan Informasi
- Tugas : melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi.
  - b. Perumusan pedoman teknis dan program pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi.
  - c. Pelaksanaan perumusan, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan advokasi, penggerakan dan informasi.
  - d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kreteria bidang pengendalian, penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi.
  - e. Pelaksanaan pengembangan desain program, koordinasi dan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi.
  - f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten jember dan pengendalian kualitas penduduk, pengelolaan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.
  - g. Pelaksanaan bimbingan teknis monitoring, pelaporan serta evaluasi dan penyediaan data pelaksanaan kegiatan bi bidang pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi.
5. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- Tugas : melaksanakan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera di tingkat kabupaten.
- Fungsi :
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.
  - b. Perumusan pedoman teknis dan program keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.
  - c. Pelaksanaan norma, standar, procedure dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.
  - d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.

- e. Pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.
  - f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera
  - g. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pelayanan keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera
  - h. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan keluarga berencana, ketahanan dan keluarga sejahtera.
6. UPTD

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas, bertujuan untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

#### **IV. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang ada per 3 September 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 48 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 81 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 33 orang atau 40 %. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
Komposisi Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P	
	Σ	SD	SM A	D3	S1	S2	Σ	SD	SM P	SM A	D3	S1			S2
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				0	1	0								
Jabatan Administrasi	0						0								
1. Administrator	5				5		4					1	3	2	2
2. Pengawas	2				2		1					1		1	
3. Pelaksana	52		13	15	24		12	3		3	2	4		9	4
Jabatan Fungsional	21				21		10				1	7	2	7	3
Jabatan Fungsional Khusus BKKBN	34		72		39		38			10		28		15	23
PPPK	0						6					6			1
Non ASN	0						10	2		5		6	1	13	7
Jumlah	192	0	85	15	92	0	86	5	0	18	3	54	6	47	40

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

## V. Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Jawa 51 Sumbersari – Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Kabupaten Jember cukup memadai, karena ruangan sudah terbagi setiap bidang. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2  
 Profil Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Per 3 September 2025

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Portable Gerating Set	27	Baik	27
2	Pompa Air	1	Baik	1
3	Station Wagon	1	Baik	1
4	Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke bawah)	1	Baik	1
5	Sepeda Motor	130	Baik	130
6	Mobil Unit Penerangan Darat	6	Baik	6
7	Mesin Bor Tangan	1	Baik	1
8	Termometer Standar	1	Baik	1
9	Mesin Penghitung Uang-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	Baik	1
10	Dst. Alat Reproduksi (Penggandaan)	1	Baik	1
11	Lemari Besi/Metal	43	Baik	43
12	Lemari Kayu 3		Baik	
13	Rak Besi	1	Baik	1
14	Rak Kayu	48	Baik	48
15	Filling Cabinet Besi	40	Baik	40
16	Filling Cabinet Kayu	1	Baik	1
17	Brandkas	2	Baik	2
18	Rotary Filling	1	Baik	1
19	Lemari Kaca	11	Baik	11
20	White Board	26	Baik	26
21	Mesin Absensi	32	Baik	32
22	Overhead Projector	22	Baik	22
23	LCD Projector/Infocus	20	Baik	20
24	Papan Pengumuman	2	Baik	2
25	Dst. ALAT KANTOR LAINNYA	4	Baik	4
26	Meja Kerja Kayu	36	Baik	36
27	Kursi Besi/Metal	68	Baik	68
28	Meja Rapat	19	Baik	19
29	Tempat Tidur Besi	5	Baik	5
30	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	Baik	7
31	Kursi Rapat	104	Baik	104
32	Kursi Tamu	1	Baik	1
33	Kursi Putar	34	Baik	34
34	Kursi Lipat	4	Baik	4

35	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	Baik	2
36	Lemari Es	1	Baik	1
37	A.C Sentral	2	Baik	2
38	A.C Window	3	Baik	3
39	A.C Split	14	Baik	14
40	Kipas Angin	30	Baik	30
41	Exhause Fan	12	Baik	12
42	Televisi	3	Baik	3
43	Sound System	2	Baik	2
44	Unit Power Supply	36	Baik	36
45	Camera Vidio	5	Baik	5
46	Tustel	1	Baik	1
47	Mesin Jahit	6	Baik	6
48	Tangga Alumunium	1	Baik	1
49	Handy Cam	2	Baik	2
50	Dst. ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	109	Baik	109
51	Alat Pemadam/Portable	2	Baik	2
52	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	1
53	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Baik	5
54	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14	Baik	14
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	23	Baik	23
56	Meja Rapat Pejabat Eselon III	4	Baik	4
57	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	Baik	1
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	1
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik	1
60	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	58	Baik	58
61	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	1	Baik	1
62	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik	1
63	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	Baik	1
64	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	Baik	1
65	Lemari Buku untuk Perputakaan	3	Baik	3
66	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	2	Baik	2
67	Audio Amplifier	1	Baik	1
68	Profesional Sound System	38	Baik	38
69	Uninrerruptible Power Supply (UPS)	1	Baik	1
70	Telephone Mobile	61	Baik	61
71	Facsimile	4	Baik	4
72	Publik Address (Lapangan)	19	Baik	19
73	Model Implan	3	Baik	3

74	Dst. ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	105	Baik	105
75	Dst. ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	6	Baik	6
76	Uninerruptible Power Supply (UPS)	2	Baik	2
77	Mini Komputer	2	Baik	2
78	Internet	1	Baik	1
79	Dst. KOMPUTER JARINGAN	1	Baik	1
80	P.C Unit	69	Baik	69
81	Lap. Top	34	Baik	34
82	Note Book	53	Baik	53
83	Dst. PERALATAN MAINFRAME	2	Baik	2
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	73	Baik	73
85	Bangunan Gedung Permanen	13	Baik	13
86	Bangunan Gedung Tertutup Permanen	1	Baik	1
87	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	19	Baik	19
88	Pagar Permanen	1	Baik	1
89	Sejarah	5	Baik	5
90	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	39	Baik	39
91	Dst. ASET LAIN-LAINNYA	43	Baik	43
92	ASET LAINNYA	82	Baik	82

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025

## **VI. Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember memiliki 7 Program, 21 Kegiatan, dan 41 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 31.144.597.721,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4  
 Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  
 Tahun 2025

No.	Uraian	ANGGARAN
1	2	3
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.308.913.621</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.932.798.226</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.630.578.226
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	302.220.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>14.271.000</b>
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14.271.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>394.095.260</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.223.860
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.010.400
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.861.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>715.536.235</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	170.028.235
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	545.508.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>252.212.900</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.125.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.446.900
	<b>PROGRAM PENGARASUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>0</b>
	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	0
	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0

	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>220.716.100</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.794.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.794.000
	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>140.422.100</b>
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.946.100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.476.000
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>34.500.000</b>
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.500.000
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>228.720.000</b>
	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.794.000</b>
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	55.794.000
	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115.476.000</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	115.476.000
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>57.450.000</b>
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	34.500.000
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	22.950.000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>700.800.000</b>
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>0</b>
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota</b>	<b>700.800.000</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	208.800.000

	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	120.000.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	372.000.000
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>9.187.662.000</b>
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.560.425.000</b>
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	435.240.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	775.155.000
	Pengendalian Program KKBPK	250.030.000
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>441.595.000</b>
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	441.595.000
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.262.014.000</b>
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.000.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.157.830.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.184.000
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>1.923.628.000</b>
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	560.000.000
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	1.363.628.000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>12.497.786.000</b>
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>12.497.786.000</b>
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	126.000.000
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	5.625.000.000

	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.746.786.000
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>31.144.597.721</b>

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025

## VII. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Meningkatnya Masyarakat yang setara
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Profesional, Efektif, Dan Efesien

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2025-2030 yaitu: “Dengan cinta wujudkan Jember Baru yang lebih Sejahtera dan Maju.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember ikut mendukung Misi, tujuan dan sasaran yaitu

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Visi “DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”,

- Misi ke 2 “Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul berdaya saing dan religius melalui akses pendidikan, kesehatan dan pelatihan keterampilan”
- Tujuan : Meningkatkan masyarakat yang setara  
Tujuan tersebut didukung dengan indikator tujuan yaitu meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Sasaran Strategis :
  - Menurunnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

- Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Masyarakat

Indikator Tujuan : Prosentase Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2025	2024	2025	2026
Meningkatnya Masyarakat yang Setara	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		83,7	85	85,85	85,85	87,7
Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan		71,64	72	72,5	73	73,5
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga )		54,05	55,05	56	60,24	61.23

Sumber data : Tabel TC 25 pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Masyarakat yang Setara	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	$IPG = (\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki laki (IPML)} + \text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan (IPMP)}) \times IPM$	Bidang PP/PA dan Bidang KB KS	Data Statistik
Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	$\text{Persentase Pelayanan Tertangani} = (\text{Jumlah laporan kasus kekerasan} / \text{Jumlah korban kekerasan yang tertangani}) \times 100\%$	UPTD PPA Bidang PP Bidang PA	Kemen PPA
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.	Bidang Dalduk, Bidang KB KS, Bidang PA dan Bidang PP	SIPERINDU BKKBN

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Nomor : 065 / 05.19 / 35.09.317 / 2024, Tahun 2025

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD ke dalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2025.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2025 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2025</b>
1	Meningkatnya Masyarakat yang Setara	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	85
2	Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	56
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	60,24

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember didukung dengan anggaran program 7 yaitu :

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.308.913.621	APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	-	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp	220.716.100	APBD, DAK
4	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	228.720.000	APBD, DAK
5	Program Pengendalian Penduduk	Rp	700.800.000	DAK
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Rp	9.187.662.000	DAK
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	12.497.786.000	DAK
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>31,144.597.721</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jawa Nomor 51 Sumpersari Jember Telp. 0331 – 422103,  
E-mail : dppppakb@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Moh. Djamil, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Drs. Moh. Djamil, M.Si

NIP. 19680924 198809 1 001

Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Masyarakat yang Setara	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	85,85
2	Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	84%
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	60,24
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.308.913.621,00	P – APBD
2 Program Perlindungan Perempuan	Rp 220.716.100,00	P – APBD , DAK
3 Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 228.720.000,00	P – APBD , DAK
4 Program Pengendalian Penduduk	Rp 700.800.000,00	DAK
5 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 9.187.662.000,00	DAK
6 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 12.497.786.000,00	DAK
Jumlah	Rp 31.144.597.721,00	

Jember, 24 September 2025

Pihak Pertama

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Drs. Moh. Djamil, M.Si  
NIP. 19680924 198809 1 001

Pihak Kedua  
Bupati Jember,



Muhammad Fawait

#### **D. Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2025**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana Didukung oleh
  - Program Pengendalian Penduduk dengan Anggaran Rp 700.800.000
  - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan Anggaran Rp. 9.187.662.000
  - Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 9.888.462.000 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 31,78 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember
- b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kualitas Keluarga Didukung oleh :
  - Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Dengan Anggaran Rp 12.497.786.000
  - Program Perlindungan Perempuan Dengan Anggaran Rp. 220.716.100
  - Program Perlindungan Khusus Anak Dengan Anggaran Rp. 228.720.000Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 12.947.222.100 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 41.6 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2025 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2  
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya Masyarakat yang Setara	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	85,85	87	101%	87.5	101%
2	Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	56	58	103%	60	103%

	Perempuan dan Anak						
3	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	60.24	35.54	59%	61	103%

Sumber Data Realisasi : Laporan dari aplikasi SIPERINDU.ONLINE dari BKKBN 2025

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 3 indikator sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember rata rata mencapai 103.3 % dan masuk dalam kategori sangat tinggi Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2025 menunjukkan kenaikan, Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2025 -2030.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun tahun sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2022	2025	2024	2025
Meningkatnya Masyarakat yang Setara	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	83.7	85	85,79	87
Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	71,64	72	72,5	73
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	54,05	55,05	56	60.24

Sumber Data Realisasi : Laporan dari aplikasi SIPERINDU.ONLINE dari BKKBN 2025

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Masyarakat yang Setara

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2022 s.d 2025.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2022 s.d 2025.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Keluarga

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren naik dan turun realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4

(Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025		
			Kab.Jember	Provinsi Jawa Timur	Nasional
1	Meningkatnya Masyarakat yang Setara	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	87	68.3	61.7
2	Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan	73	75	73
3	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga )	56,05	62.7	62.4

Sumber Data Realisasi : Laporan dari aplikasi BPS 2025

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Jember pada angka CPR berada diatas realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Tetapi pada pembangunan keluarga masih perlu ditingkatkan, karena masih di bawah rata realisasi kinerja Provinsi Jawa Timur dan Nasional

### C. Analisis Program Kegiatan Yang Mendukung Sasaran

Tabel 3.5  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Serapan Anggaran
		(Rp....)	(Rp....)	
Sasaran 1 :	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>700.800.000</b>	<b>101.574.989</b>	<b>14.4%</b>
	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>			
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			
	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota</b>	<b>700.800.000</b>	<b>101.574.989</b>	<b>14.4%</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	208.800.000	24.075.000	3.43%
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	120.000.000	0	0%
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	372.000.000	77.499.989	20.8%
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>9.187.662.000</b>	<b>1.992.547.859</b>	<b>21.6%</b>
	<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.560.425.000</b>	<b>587.730.000</b>	<b>37.6%</b>
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000,000	49.870.000	49.9%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	435.240.000	155.978.000	35.8%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	775.155.000	438.155.000	56.5%
	Pengendalian Program KKBPK	250.030.000	97.785.000	39.1%
	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>441.595.000</b>	<b>148.800.000</b>	<b>33.7%</b>

	Pembinaan IMP dan Program KKBPB di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	0%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	441.595.000	148.800.000	33.7%
	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.262.014.000</b>	<b>2.951.913.000</b>	<b>56.1%</b>
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.000.000	0	0%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.157.830.000	2.938.513.000	57%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	0	0%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.184.000	13.400.000	23%
	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>1.923.628.000</b>	<b>75.832.500</b>	<b>3.9%</b>
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	560.000.000	75.832.500	13.5%
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	1.363.628.000	0	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,187,662,000</b>	<b>2,094,122,848</b>	<b>22.8%</b>
SASARAN 2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>12.497.786.000</b>	<b>2.868.480.000</b>	<b>22.9%</b>
	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>12.497.786.000</b>	<b>2.868.480.000</b>	<b>22.9%</b>
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	126.000.000	0	0%
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	5.625.000.000	984.000.000	17.5%

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.746.786.000	1.884.480.000	27.9%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>220.716.100</b>	<b>75.811.225</b>	<b>34.3%</b>
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.794.000</b>	<b>45.678.000</b>	<b>99.7%</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.794.000	45.678.000	99.7%
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>140.422.100</b>	<b>29.681.225</b>	<b>21.1%</b>
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.946.100	23.917.500,-	95.9%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.476.000	50.030.163	43.3 %
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>34.500.000</b>	<b>33.860.000</b>	<b>98.1%</b>
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.500.000	33.860.000	98.1%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>228.720.000</b>	<b>85.139.581</b>	<b>37.2%</b>
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.794.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>6.7%</b>
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan KTA	55.794.000	3.770.000	6.7%
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</b>	<b>115.476.000</b>	<b>89.734.133</b>	<b>77.7%</b>

	<b>yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	115.476.000	89.734.133	77.7%
	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>57.450.000</b>	<b>38.260.000</b>	<b>66.6%</b>
	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	34,500,000	33.860.000,	98.1%
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	22.950.000	19.800.000	86%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,947,222,100</b>	<b>3,029,430,806</b>	<b>23.4%</b>

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran I** : Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

	BIDANG : KBKS			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KS)			
	Kegiatan : Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola Dan Pelaksana (Kader) Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN PPKA)			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 6.746.786.000,-	Rp. 1.880.790.000,-	27,87
	Outcome :			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga berisiko stunting teridentifikasi dengan jelas (ibu hamil KEK, balita gizi kurang, anak dengan riwayat stunting, dsb).</li> <li>2. Peningkatan cakupan intervensi spesifik dan sensitif pada KRS berkat pendampingan TPK (akses gizi, kesehatan, sanitasi, KB, dll).</li> <li>3. Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan keluarga sasaran dalam praktik 1000 HPK, gizi, pola asuh, sanitasi, dan kesehatan reproduksi.</li> <li>4. Kader TPK lebih kompeten karena ada peningkatan kapasitas berkelanjutan.</li> <li>5. Tingkat kepatuhan KRS terhadap layanan dasar meningkat (pemeriksaan kehamilan, imunisasi, konsumsi tablet tambah darah, KB pasca salin, dsb).</li> <li>6. Sistem monev berjalan efektif → menghasilkan feedback untuk memperbaiki kualitas pendampingan setiap bulan.</li> <li>7. Kontribusi nyata terhadap percepatan penurunan prevalensi stunting di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota.</li> </ol>			
	Output :			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting (KRS) oleh 1.875 Tim TPK dengan 5.625 kader (setiap bulan).</li> <li>2. Pencatatan dan pelaporan hasil pendampingan melalui aplikasi SIGA, e-PPGBM, dan form monitoring BKKBN.</li> </ol>			

3. Pemberian honorarium sebagai insentif operasional kepada TPK sesuai aturan yang berlaku.
4. Terlaksananya peningkatan kapasitas kader TPK melalui orientasi, pelatihan, refreshment, atau bimbingan teknis.
5. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi (monev) rutin tentang kualitas pendampingan keluarga (misalnya: kunjungan rumah, penyuluhan, rujukan, dan layanan).
6. Dokumentasi pendampingan dan monev (laporan bulanan, daftar hadir, foto, dan notulen).

**Pelaksanaan Kegiatan :**

1. Pendampingan Keluarga Resiko Stunting di 31 Kecamatan se-Kabupaten Jember oleh 5626 kader Tim Pendamping Keluarga

Tempat : 248 Desa/ Kelurahan di 31 Kecamatan se-Kabupaten Jember  
 Hari/Tanggal : Setiap bulan mulai bulan Mei sd Agustus 2025  
 Jam : 08.00 WIB sd selesai  
 Peserta : 5626 kader TPK dari 31 Kecamatan  
 Sasaran : Calon Pengantin, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Baduta dan Balita  
 Hasil Kegiatan :



**Pelaksanaan Kegiatan :**

2. Peningkatan Kapasitas Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam Optimalisasi Pendampingan Keluarga Resiko Stunting (KRS) pada 1000 HPK pada rangkaian acara Bunga Desaku Cantik

Tempat : 4 Kecamatan : Silo, Ambulu, Arjasa, Sumberbaru  
Hari/Tanggal : Setiap bulan mulai bulan Juni sd September 2025  
Jam : 08.00 WIB sd selesai  
Peserta : 400 kader TPK dan unsur Desa di 4 Kecamatan  
Sasaran : Kader TPK, Tenaga Kesehatan, TP PKK, Perangkat Desa, Calon Pengantin  
Narasumber : 1. Kepala Bidang KBKS  
2. Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Jember  
3. Direktur RSD dr. Soebandi

- Hasil Kegiatan :
- a. Pemberian beberapa sertifikat penghargaan oleh Ning Ghyta Eka Puspita, SE., M.Sc. selaku Ketua TP PKK Kab Jember
  - b. Pemberian sertifikat Elsimil kepada Catin sebagai simbol komitmen dalam mewujudkan keluarga sehat
  - c. Penghargaan diberikan kepada TPK Desa terbaik dalam pendampingan KRS
  - d. Melalui orientasi TPK, peserta mendapatkan penguatan peran dan fungsi dalam mendampingi keluarga serta strategi percepatan penurunan stunting.
  - e. Diskusi interaktif memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan masukan, pengalaman, serta strategi di lapangan.



--	--

BIDANG : KBKS				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
	Kegiatan : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rakodes, Minilokakarya			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 435.240.000,-	Rp. 155.978.000,-	35.8
	<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Meningkatnya koordinasi dan sinergi lintas sektor di tingkat kecamatan dalam percepatan penurunan stunting.</li> <li>9. Tersedianya data real-time dan valid terkait keluarga berisiko stunting, cakupan intervensi, serta perkembangan status gizi anak.</li> <li>10. Meningkatnya cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif pada keluarga sasaran melalui tindak lanjut yang terarah.</li> <li>11. Berjalannya fungsi TPPPS Kecamatan secara optimal sesuai peraturan yang berlaku.</li> <li>12. Terpetakannya desa/kelurahan prioritas yang membutuhkan perhatian lebih intensif dalam program penurunan stunting.</li> <li>13. Adanya percepatan perbaikan layanan dasar (kesehatan, gizi, sanitasi, PAUD, perlindungan sosial) yang menyoar keluarga berisiko stunting</li> </ol>			
<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Terlaksananya forum koordinasi bulanan di tingkat kecamatan yang melibatkan camat, kepala puskesmas, TP PKK, PLKB/PKB, TPK, OPD terkait, dan pihak desa/kelurahan</li> <li>8. Tersusunnya laporan perkembangan hasil konvergensi percepatan penurunan stunting per kecamatan (cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif).</li> <li>9. Pemetaan keluarga berisiko stunting berdasarkan data hasil pendampingan keluarga oleh TPK (data SIGA, e-PPGBM, dan sumber lain).</li> <li>10. Identifikasi masalah, hambatan, dan solusi program percepatan penurunan stunting di wilayah kecamatan.</li> <li>11. Rencana tindak lanjut (RTL) bulanan yang disepakati lintas sektor untuk perbaikan layanan dan pendampingan.</li> <li>12. Dokumentasi kegiatan minilokakarya</li> </ol>				
<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Pertemuan MInilokakarya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di 31 Kecamatan se-Kabupaten Jember</p> <p>Tempat : Balai KB 31 Kecamatan se-Kabupaten Jember</p> <p>Hari/Tanggal : Setiap bulan mulai bulan Juni sd Agustus 2025</p> <p>Jam : 08.00 WIB sd selesai</p> <p>Peserta : 2328 orang dari 31 Kecamatan</p> <p>Narasumber : Camat, Kepala Puskesmas dan Koordinator Balai KB</p>				

**Lampiran Data Hasil Mini Lokakarya Kabupaten Jember  
(Bulan Juni sd Agustus 2025)**

<b>No.</b>	<b>Jenis Permasalahan</b>	<b>TPPPS Kecamatan (dapat diselesaikan)</b>	<b>TPPPS Kabupaten (Perlu Kebijakan/Atensi TPPPS Kabupaten)</b>
1	Rendahnya pendampingan catin oleh Kader TPK (catin kondisi hamil, nikah siri, dirahasiakan, catin diluar kota, dll)	Koordinasi intensif kader dengan KUA/Desa dan Puskesmas; peningkatan KIE langsung ke keluarga catin; kunjungan rumah.	Perlu adanya <b>MoU/kebijakan bersama antara Dinkes, Kemenag, dan DP3AKB</b> bahwa semua catin wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas (sebagai pintu utama entry data) agar data tidak tumpang tindih dan pendampingan catin bisa maksimal.
2	Tingginya angka perkawinan anak & rendahnya perencanaan keluarga	Sosialisasi PUP (Pendewasa	1) Pengetatan aturan & pengawasan

		<p>an Usia Perkawinan) di sekolah/des a; KIE oleh kader/PLKB ; advokasi tokoh agama &amp; tokoh masyarakat untuk mendukung pencegahan perkawinan anak.</p>	<p>dispensasi nikah; 2) Penguatan regulasi pencegahan perkawinan anak melalui Perbup/Perda ; 3) Program lintas OPD (Dindik, Dinsos, DP3AKB, Dinkes) dalam bentuk edukasi berkelanjutan ; 4) Optimalisasi peran Forum Anak &amp; Puspaga dalam edukasi remaja; 5) Kolaborasi dengan Kemenag untuk edukasi pranikah &amp; syarat</p>
--	--	--	--

			pencatatan nikah.
3	Data BNBA (NIK) balita stunting tidak lengkap (masih pakai NIK dummy)	Verifikasi lapangan oleh kader & operator desa; koordinasi dengan orang tua.	Integrasi data antar Dinas (Dinkes, Dukcapil, Bappeda); sinkronisasi sistem data stunting kabupaten.
4	Tingkat kehadiran masyarakat ke posyandu rendah	Penguatan KIE, reminder kunjungan via WA grup RT/Desa, jemput bola kader.	Dukungan kebijakan insentif kader TPK; pengembangan inovasi pelayanan posyandu.
5	Data sasaran tumpang tindih (lintas sektor) karena Jember belum memiliki <b>dashboard real-time</b>	Koordinasi lintas kader/TPK di desa untuk melakukan validasi manual bersama (by name by address), serta membandingkan data antar sektor	Perlu pengembangan <b>dashboard real-time terpadu</b> tingkat kabupaten yang mengintegrasikan berbagai sistem data (SIGA, e-PPGBM, DTKS,

		di tingkat kecamatan.	Dukcapil, dll) agar data tidak tumpang tindih; disertai pelatihan operator desa & kecamatan untuk input dan updating data.
6	Kurangnya pengetahuan bumil, keluarga & masyarakat tentang gizi bumil, ASI eksklusif, MPASI & stunting	KIE berkesinambungan oleh kader, bidan, PLKB di posyandu & kunjungan rumah; melibatkan tokoh masyarakat/ agama untuk memperkuat pesan.	Perlu adanya <b>atensi khusus Pemerintah Kabupaten</b> berupa <b>publikasi massal dan kampanye berkelanjutan</b> terkait isu <b>stunting, AKI, dan AKBa</b> melalui media sosial resmi, baliho, radio lokal, TV daerah, hingga event kampanye gizi nasional; disertai

			pelatihan tambahan bagi kader dan TPK.
7	Kekurangan fasilitas alat kesehatan di puskesmas	Pemanfaatan alat seadanya sambil rujuk bila perlu; inovasi penggunaan media sederhana.	Perlu <b>pengadaan alat kesehatan yang belum tersedia</b> di puskesmas melalui APBD, integrasi layanan dengan rumah sakit rujukan, dan kebijakan dukungan pengembangan <b>telemedicine</b> sebagai solusi keterbatasan SDM & alat.
8	Tambahan anggaran PMT belum optimal	Mengoptimalkan bahan pangan lokal untuk PMT, mengatur jadwal pemberian	Penambahan alokasi APBD untuk PMT, regulasi pemanfaatan DD untuk PMT.

		PMT tepat waktu	
9	Rembuk stunting desa belum optimal (alokasi dana desa belum fokus)	Melakukan pendampingan teknis kepada desa sebelum rebuk stunting; memastikan data sasaran yang valid dibawa ke forum rebuk; advokasi langsung ke kepala desa agar Dana Desa diarahkan untuk intervensi stunting prioritas.	Penyusunan <b>pedoman/petunjuk teknis pemanfaatan Dana Desa berbasis stunting</b> ; penguatan regulasi agar setiap desa wajib melaksanakan rebuk stunting; monitoring & evaluasi pelaksanaan rebuk oleh Pemkab secara berkala..





BIDANG : KBKS				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : KELUARGA BERENCANA			
	Kegiatan : PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 59.184.000,-	Rp. 13.400.000,-	23
	Outcome : Pencapaian penurunan *TFR (Total Fertility Rate), **AKI (Angka Kematian Ibu), dan **AKB (Angka Kematian Bayi)* secara tidak langsung.			
	Output : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan KB yang sesuai standar. 2. Meningkatnya kepuasan akseptor KB terhadap layanan di fasilitas kesehatan. 3. Terjaminnya ketersediaan metode kontrasepsi yang aman, bermutu, dan terjangkau. 4. Meningkatnya cakupan peserta KB aktif dan peserta KB baru. 5. Menurunnya angka putus pakai (drop out) kontrasepsi.. 6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama OPD dengan Fasyankes			
Pelaksanaan Kegiatan : Pembinaan Fasyankes KB : Sosialisasi Aplikasi SIRIKA Tempat : UPT Balai Diklat KKB dan Aula Bakorwil Jatim Hari/Tanggal : Selasa & Rabu/ 19 & 20 Agustus 2025 Jam : 08.00 WIB				

Peserta : 60 Penanggung jawab Pelayanan KB di Fasyankes dan 31 Penyuluh KB  
Narasumber : Tim KB – BKKBN Provinsi Jawa Timur

Notulensi ( laporan kegiatan )

Acara di mulai pada pukul 08.00 WIB, diawali dengan registrasi. Pukul 09.00 acara di buka oleh Kepala DP3AKB Kabupaten Jember Bpk Drs. Moh.Djamil,M.Si. Pemberian materi oleh narasumber dari BKKBN Provinsi yang pertama materi tentang Alkon BKKBN oleh dr.Sofyan Rizalanda dan materi ke dua tentang SIRIKA Faskes oleh Ibu Nina, selanjutnya peserta melakukan praktik langsung pengisian SIRIKA difasilitasi oleh tim BKKBN Provinsi Jawa Timur. Acara di tutup pada pukul 13.00 WIB

DOKUMENTASI KEGIATAN





BIDANG : KBKS				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : KELUARGA BERENCANA			

Kegiatan : PENINGKATAN KEPESERTAAN PENGGUNAAN MKJP

Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 5.157.830.000	Rp 2.938.513.000	57
------------------------------	-------------------	------------------	----

Outcome :

Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, dan Prevalensi Balita stunting turun

Output :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan KB MKJP
2. Memberikan edukasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi dan KB
3. Menyediakan pelayanan medis MKJP yang aman dan berkualitas
4. Meningkatkan partisipasi pria dalam program KB terutama KB MOP
5. Mendukung tercapainya target CPR (Contraceptive Prevalence Rate)
6. Memperkuat kemitraan antar lembaga dalam pelaksanaan program KB

Pelaksanaan Kegiatan :

BAKSOS MOP MOMEN REKOR MURI MOP

Tempat : RSD dr.SOEBANDI JEMBER

Hari/Tanggal : Sabtu / 26 April 2025

Jam : 07.00 WIB sampai selesai

Peserta : 13 Akseptor MOP

Provider MOP : Tim BKKBN Provinsi Jawa Timur

Notulensi ( laporan kegiatan )

Acara Baksos MOP dalam rangka Rekor MURI Nasional ditargetkan sebanyak 15 Peserta MOP, Baksos MOP diawali dengan rekrutmen calon akseptor oleh kader dan Penyuluh KB di 31 Kecamatan selanjutnya dilakukan pemantapan calon akseptor melalui pendampingan oleh Balai KB Kecamatan. Pada tanggal 26 April 2025 pelaksanaan MOP diawali dengan pemeriksaan Tekanan Darah dan Gula darah sewaktu pada calon akseptor MOP.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Pelaksanaan Kegiatan :

BAKSOS MOW & MOP MOMEN TMMD TAHUN 2025

Tempat : RSD dr.SOE BANDI JEMBER

Hari/Tanggal : Sabtu / 17 Mei 2025

Jam : 06.00 WIB sampai selesai

Peserta : 214 Akseptor MOW dan 4 Akseptor MOP

Provider MOW & MOP : Tim BKKBN Provinsi Jawa Timur

Notulensi ( laporan kegiatan )

Acara Baksos MOW MOP ditargetkan sebanyak 250 peserta MOW dan 10 Peserta MOP, Baksos MOW MOP diawali dengan pendaftaran calon akseptor yang dimulai pada Bulan Maret 2025, selanjutnya dilakukan pemantapan calon akseptor melalui pendampingan oleh Balai KB di 31 Kecamatan. Pada tanggal 14, 15 dan 16 Mei 2025 dilakukan pemeriksaan awal/skrining kesehatan pada calon akseptor MOW. Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2025 dilakukan tindakan MOW pada peserta, dimana jumlah peserta yang dilakukan MOW sebanyak 214 dan jumlah peserta MOP sebanyak 4 peserta.

#### DOKUMENTASI KEGIATAN





Pelaksanaan Kegiatan :

BAKSOS MOW & MOP GUSE PEDULI KESEHATAN DI RSD BALUNG

Tempat : RSD Balung

Hari/Tanggal : Sabtu & Minggu/ 13 & 14 September 2025

Jam : 06.00 WIB sampai selesai

Peserta : 218 Akseptor MOW dan 13 Akseptor MOP

Provider MOW & MOP : Tim BKKBN Provinsi Jawa Timur

Notulensi ( laporan kegiatan )

Acara Baksos MOW MOP giat Guse Peduli kesehatan ditargetkan sebanyak 300 peserta MOW dan 15 Peserta MOP, Baksos MOW MOP diawali dengan pendaftaran calon akseptor yang dimulai pada Bulan Agustus 2025, selanjutnya dilakukan pemantapan calon akseptor melalui pendampingan oleh Balai Kecamatan di 31 Kecamatan. Pada tanggal 9 dan 10 September 2025 dilakukan pemeriksaan awal/skrining kesehatan pada calon akseptor MOW berjumlah 224 peserta. Selanjutnya pada tanggal 13 dan 14 September dilakukan tindakan MOW pada peserta, dimana pada tanggal 13 September jumlah peserta yang dilakukan MOW sebanyak 141 dan jumlah peserta MOP sebanyak 8 peserta, sedangkan pada tanggal 14 September jumlah peserta yang dilakukan MOW sebanyak 77 dan jumlah peserta MOP sebanyak 5 peserta, sehingga total peserta MOW sebanyak 218 dan peserta MOP sebanyak 13 peserta.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Pemerintah Kabupaten Jember

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana**

*Khitanan Masal*  
Pengabdian dan Pelayanan Kesehatan Masal

@dppakb.jemberkab  
Website : dppakb.jemberkab.go.id

dppakb



Pelaksanaan Kegiatan :

PELAYANAN KB MKJP SERENTAK DALAM RANGKA PERINGATAN HARI KONTRASEPSI SEDUNIA TAHUN 2025

Tempat : Seluruh Fasyankes Mitra DP3AKB Kabupaten Jember

Tanggal : 9 sampai dengan 17 September 2025

Peserta : 300 Akseptor Implant dan 40 Akseptor IUD

Provider : Tenaga Medis terlatih Pelayanan IUD dan Implant

Notulensi ( laporan kegiatan )

Momen Pelayanan KB Serentak dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia pada Tahun 2025 ini dilayani di 16 Fasyankes KB dan melayani sebanyak 300 akseptor Implant dan 40 akseptor IUD.

#### DOKUMENTASI KEGIATAN



BIDANG : KBKS				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 250.030.000,-	Rp. 97.785.000,-	39,11
	<p>Outcome :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Terbangunnya komitmen lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting di kabupaten.</li> <li>15. Meningkatnya koordinasi dan sinergi antar-OPD, mitra, dan lembaga non-pemerintah dalam penanganan stunting.</li> <li>16. Kebijakan daerah lebih terarah (RPJMD, RKPD, Renstra OPD, APBD) karena berbasis hasil Rakor TPPPS.</li> <li>17. Intervensi gizi spesifik dan sensitif lebih terintegrasi di desa/kelurahan lokus stunting.</li> <li>18. Penguatan peran kecamatan, desa, dan TPK melalui arahan dan kebijakan kabupaten.</li> <li>19. Ketersediaan data dan informasi yang lebih valid untuk memantau capaian penurunan stunting di tingkat kabupaten.</li> <li>20. Akselerasi pencapaian target prevalensi stunting sesuai Stranas 2025–2029 dan target nasional 14% tahun 2024 (dilanjutkan penurunan berkelanjutan)</li> </ol>			
<p>Output :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Terlaksananya forum koordinasi lintas sektor tingkat kabupaten (Bappeda, Dinkes, DP3AKB, Dinas Sosial, PUPR, Pendidikan, Pertanian, PKK, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dll).</li> <li>14. Tersusunnya laporan hasil Rakor berisi capaian, kendala, dan kebutuhan percepatan penurunan stunting</li> <li>15. Tersusunnya rencana tindak lanjut (RTL) program/kegiatan lintas sektor berbasis data keluarga berisiko stunting dan desa lokus stunting.</li> <li>16. Integrasi data stunting dan keluarga berisiko stunting dari berbagai sumber (SIGA, e-PPGBM, EHDW, SSGI, dsb) di tingkat kabupaten.</li> <li>17. Dokumentasi kegiatan (notulen, daftar hadir, foto, paparan, bahan rapat).</li> <li>18. Rekomendasi kebijakan/strategi kepada Bupati/Wakil Bupati untuk memperkuat konvergensi program penurunan stunting.</li> </ol>				
<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Bimbingan Teknis Analisa Situasi bagi operator 31 Kecamatan se-Kabupaten Jember</p> <p>Tempat : Hotel Luminor Jember</p> <p>Hari/Tanggal : 27 sd 28 Mei 2025</p> <p>Jam : 08.00 WIB sd selesai</p> <p>Peserta : 125 orang</p> <p>Narasumber : 1. Dirjen Bina Bangda Kemendagri 2. Kepala Bidang KBKS DPPPAB</p> <p>Hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Umum</li> </ol>				

- Perpres 72/2021 dan Stranas 2025–2029 menegaskan pentingnya konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif.
  - Setiap kecamatan wajib menyusun Analisa Situasi (AnSis) berbasis data keluarga berisiko stunting.
  - AnSis menjadi dasar penyusunan Rencana Kegiatan (Rencana Aksi Daerah/RAD) penurunan stunting.
2. Peran Operator Kecamatan
- Mulai 2025, operator berada di kecamatan masing-masing untuk mengisi web Aksi Bangda.
  - Operator berfungsi sebagai admin teknis dalam input, verifikasi, dan update data kegiatan aksi konvergensi.
3. Langkah-Langkah Analisa Situasi (AnSis)
- Kompilasi data: hasil pendampingan TPK (SIGA), e-PPGBM, Puskesmas, Desa/Kelurahan, Dinas Sosial, Pendidikan, dan sanitasi.
  - Pemetaan KRS (Keluarga Berisiko Stunting) per desa/kelurahan.
  - Identifikasi layanan dasar yang belum optimal:
    - Ibu hamil (ANC, TTD, KEK)
    - Balita (ASI eksklusif, MP-ASI, imunisasi)
    - Lingkungan (air bersih, sanitasi, jamban sehat)
    - Perlindungan sosial (bansos, PKH, BPNT).
  - Analisis gap antara target dan capaian layanan.
  - Prioritisasi masalah untuk ditindaklanjuti dalam forum mini lokakarya, rakor TPPPS, dan Musrenbang kecamatan.
4. Langkah Mengisi Web Aksi Bangda (Arahan 2025)
- Login menggunakan akun kecamatan masing-masing.
  - Input Tahap I (Analisa Situasi):
    - Data lokus desa stunting.
    - Data cakupan layanan dasar.
    - Pemetaan keluarga berisiko stunting.
  - Input Tahap II (Rencana Kegiatan):
    - Rencana aksi intervensi lintas sektor.
    - Penanggung jawab kegiatan.
    - Sumber pendanaan (APBD, Dana Desa, BOK, CSR, dll).
  - Input Tahap III (Remon Aksi):
    - Monitoring pelaksanaan aksi di kecamatan.
    - Update capaian setiap triwulan.
  - Validasi dan pengesahan oleh Camat sebelum dikirim ke Kabupaten.
  - Operator wajib mengunggah dokumen pendukung (notulen, foto kegiatan, rekap data).
5. Tindak Lanjut
- Operator kecamatan menyelesaikan input Analisa Situasi
  - DP3AKB dan Bappeda akan melakukan pendampingan teknis serta monitoring ke kecamatan.
  - Laporan progres akan dipaparkan pada Rakor TPPPS Kabupaten secara berkala.
  -

### Keputusan dan Kesepakatan

1. Semua kecamatan wajib melakukan input AnSis melalui web Aksi Bangda sesuai arahan terbaru 2025.
2. Operator kecamatan bertanggung jawab memastikan data valid, ter-update, dan mendapat verifikasi Camat.
3. DP3AKB Kabupaten Jember akan menyiapkan grup koordinasi khusus operator sebagai media konsultasi cepat.
4. Monitoring dan evaluasi pengisian web dilakukan tiap triwulan oleh TPPPS Kabupaten.

### Penutup

Kegiatan Bimtek diakhiri dengan penegasan bahwa Analisa Situasi menjadi instrumen utama perencanaan penurunan stunting di tingkat kecamatan, dan pengisian web Aksi Bangda 2025 wajib dilakukan secara tertib oleh operator kecamatan.







BIDANG : DALDUK ADPIN				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA			
	Kegiatan : PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 441.595.000,-	Rp. 111.600.000,-	25,3
	Outcome : Peningkatan kesertaan ber KB, khususnya MKJP Pendewasaan Usia Perkawinan/Stop Perkawinan Anak			
	Output : Peningkatan peran serta kader IMP/Sub IMP dalam upaya peningkatan kesertaan ber KB (McPR/ Pre Valensi Pencegahan perkawinan anak (menurunnya angka ASFR 15-19) Kegiatan di up load pada website kampung KB			
	Pelaksanaan Kegiatan : Kegiatan KIE oleh Kader Bangsa Kencana (IMP/Sub IMP) Bulan : April sd Juni 2025 Lokasi : 248 Desa/Kelurahan Peserta : 3 kader setiap Desa/Kel. ((992 orang) Sasaran : Pasangan Usia Subur, Un Meet Need dan keluarga			

Laporan Hasil Kegiatan :






**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN JOMBANG**  
**Jl. A. Yani No.104 Jombang Kode Pos 68168**

**LAPORAN HASIL KEGIATAN**  
**Operasional Program Bangga Kencana oleh Kader**

**Bulan : APRIL 2025**  
**Kecamatan : Jombang**

NO	NAMA	TANGGAL KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	MATERI KIE	JUMLAH SASARAN YANG TERPAPAR PROGRAM BANGGA	KETERANGAN
1	MUTROFIN	24 April 2025	Padomasan (RW 001)	Seksualitas	10 orang	
2	SUMINAH	25 April 2025	Padomasan (RW 002)	Menjadi Orang Tua Hebat	9 orang	
3	JAMIK	25 April 2025	Padomasan (RW 010)	Lansia Tangguh	12 orang	
4	ENY KUSWATI	24 April 2025	Keting (RW 008)	Menua Dengan Sehat	15 orang	
5	SEVI SUSIKAN T.	11 April 2025	Keting (RW 001)	Manfaat PHBS	8 Orang	
6	SITI NUR KAMILAH	14 April 2025	Keting (RW 014)	Manfaat KKA	10 Orang	
7	JUMAIYAH	10 April 2025	Jombang (RW 023)	Sosialisasi MKJP	12 Orang	
8	SITI MUDFARIDHA	11 April 2025	Jombang (RW 002)	Edukasi Lansia Tangguh	10 Orang	
9	MUBAROKAH	12 April 2025	Jombang (RW 001)	Edukasi Kenakalan Remaja	11 orang	
10	ARUM NUR F.	13 April 2025	Jombang (RW 032)	Sosialisasi MKJP	7 orang	
11	MURTININGSIH	11 April 2025	Ngampelrejo (RW 007)	Lansia Tangguh	10 orang	
12	CHOSI ADE IRMA N.	12 April 2025	Ngampelrejo (RW 008)	Pencegahan Seksualitas	8 orang	
13	HARYUNIWATI	25 April 2025	Wringinagung (RW 035)	KB & Kesehatan Reproduksi	7 orang	
14	GUPUH DWI P.	25 April 2025	Wringinagung (RW 037)	Penerapan PHBS	8 orang	
15	TITIN FEBRI ANTINI	25 April 2025	PAUD Handayani	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi	8 orang	
16	SITI KHOLIFAH	25 April 2025	Wringinagung (RW 040)	Kebersihan & Kesehatan Remaja	13 orang	
17	WIGIH FASANNY W.	12 April 2025	Sarimulyo (RW 002)	Lansia Tangguh Dimensi Sosial	10 orang	
18	PUTRI ANGGRAENI	25 April 2025	Sarimulyo (RW 003)	Pentingnya Kesehatan Reproduksi	6 orang	

	BIDANG : DALDUK ADPIN			
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA			
	Kegiatan : PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 744.000.000,-	Rp. 324.550.000,-	43,3
	Outcome : Semua laporan kegiatan kendukbangga/BKKBN termonitor pada aplikasi yang disiapkan Monitoring dan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan, sebagai dasar pengambilan kebijakan melaksanakan kegiatan berikutnya			
	Output : Input data pada aplikasi SIGA Input kegiatan pada website kampung KB Input data statistik di website RDK Listing Pemutakhiran Data			
Pelaksanaan Kegiatan : Bulan : April sd Agustus 2025 Lokasi : 248 Desa/Kelurahan Peserta : 744 Sub IMP Sasaran : Kader IMP/Sub IMP, Pengurus Pokja Kampung KB, Pengurus RDK dan Tim Pendamping Keluarga				
Laporan Hasil Kegiatan :				
 <p>30 Jun 2025 3.00.22 PM 51 Jalan Ahmad Yani Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Jawa Timur</p>				



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA  
BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN TANGGUL  
Jalan Diponegoro Nomor 06 Tanggul 68155

LAPORAN HASIL KEGIATAN

Daftar Hadir : Operasional Penyuluhan Program Dan Pembinaan Tenaga Lin Lapangan  
Bulan : MEI 2025  
Kecamatan : Tanggul

NO	TANGGAL	TEMPAT KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
1	1-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan PIK-R desa tanggulkulon di web SIGA	Jumlah sasaran PIKR mei 2025	
2	2-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input Kegiatan ILP Desa Tanggul Kulon di website Kampung KB	Upload Kegiatan dokumentasi ILP desa tanggul kulon	
3	3-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan BKB desa Selodakon di web SIGA	Jumlah sasaran BKB Melati 95 Mei 2025	
4	5-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan BKB desa Kramat Sukoharjo di web SIGA	Jumlah sasaran BKB Melati 49 Mei 2025	
5	6-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan BKB desa tanggulkulon di web SIGA	Jumlah sasaran BKB Melati 15, Melati 14 bulan Mei 2025	
6	7-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan BKR desa tanggulwetan di web SIGA	Jumlah sasaran BKR Bhakti Nusa Mei 2025	
7	8-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan PIK-R desa Selodakon di web SIGA	Jumlah sasaran PIKR mei 2025	
8	9-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan BKB desa tanggul wetan di web SIGA	Jumlah sasaran BKB Melati 17 Mei 2025	
9	10-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan BKR desa Kramat Sukoharjo di web SIGA	Jumlah sasaran BKR Mawar merah Mei 2025	
10	11-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan BKR desa Kramat Sukoharjo di web SIGA	Jumlah sasaran BKR Handayani Mei 2025	
11	12-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan BKR desa Selodakon di web SIGA	Jumlah sasaran BKR Melati 95 Mei 2025	
12	13-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data Poktan BKL di web SIGA	Jumlah sasaran BKL Mei 2025	
13	14-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input Kegiatan PPKBD desa Tanggul Kulon di web SIGA	Input kegiatan PPKBD bulan mei	
14	16-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input Kegiatan desa Tanggulwetan di web SIGA	Upload kegiatan dokumentasi pertemuan PKK rutin desa tanggulwetan	
15	17-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data pelayanan KB di web SIGA	Input Akseptor KB pelayanan bulan mei 2025	
16	18-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data pelayanan KB di web SIGA	Input Akseptor KB pelayanan bulan April 2025	
17	19-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input Kampung KB diweb kampung kb	upload kegiatan dokumentasi KIE desa Tanggul Wetan	
18	20-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data pelayanan KB di web SIGA	Input pelayanan Implan PMB windu findiyanti	
19	22-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input data BKR Tanggul Kulon di website SIGA	Jumlah sasaran BKR Bhakti nusa = 132	
20	23-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input Kampung KB diweb kampung kb	upload kegiatan dokumentasi KIE desa Tanggul Kulon	
21	24-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input Kampung KB diweb kampung kb	upload kegiatan dokumentasi KIE desa Selodakon	
22	25-5-2025	Balai Penyuluh KB	Input Kampung KB diweb kampung kb	upload kegiatan dokumentasi KIE desa Kramat Sukoharjo	

BIDANG : DALDUK ADPIN				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
	Kegiatan : Pelaksanaan Advokasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 100.000.000,-	Rp. 49.870.000,-	49,87
	Outcome :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>21. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Program Bangga Kencana, terutama terkait isu kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.</li> <li>22. Terbentuknya opini publik yang positif dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana.</li> <li>23. Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan Program Bangga Kencana, baik layanan KB, konseling keluarga, maupun pelayanan kesehatan reproduksi.</li> <li>24. Tersedianya materi informasi, edukasi, dan komunikasi (KIE) yang menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan segmentasi sasaran melalui berbagai kanal media (cetak, elektronik, dan luar ruang).</li> <li>25. Menguatnya kolaborasi dengan media massa dan stakeholder dalam menyebarkan pesan Bangga Kencana secara berkelanjutan.</li> <li>26. Terciptanya perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat, sejahtera, dan berketahanan melalui pemanfaatan informasi Bangga Kencana.</li> </ul>				
Output :				
<ul style="list-style-type: none"> <li>19. Terpaparnya Masyarakat umum tentang program Bangga Kencana dari Percepatan Penurunan Stunting</li> <li>20. Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam rangka menyukseskan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting.</li> <li>21. Terciptanya inovasi bagi masyarakat dalam promosi Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting</li> </ul>				
Pelaksanaan Kegiatan :				
<p>Pertemuan kampung KB dilakukan untuk mengevaluasi pelaporan website kampung KB dan dilaksanakan di 31 Kecamatan se-Kabupaten Jember</p> <p>Tempat : DP3AKB Kabupaten Jember</p> <p>Tanggal : Juni-Agustus 2025</p> <p>Peserta : Kader Bangga Kencana, Pelajar SMP, Pelajar SMA, Mahasiswa</p>				

Lampiran Foto Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang Kabupaten Jember (Bulan Juni-Agustus 2025)

**dpppakkb** **JEMBER BARU JEMBER MAJU!**

**KOMPETISI VIDEO KONTEN KREATIF 2025**

Tema :  
**"KIE PROGRAM BANGGA KENCANA"**

**KETENTUAN**

- Video diunggah di Platform Youtube, Instagram, dan Tiktok.
- Pendaftar boleh dari unsur Kader, Pelajar dan Umum
- Durasi video Youtube maksimal 5 Menit, Instagram dan Tiktok Maksimal 1 menit

**CONTACT PERSON**

- Tarisa : +62 812 1651 9783
- Fahmi : +62 821 4098 9021
- Zimz : +62 857 0775 8354

Pendaftaran  
**18 Juni - 30 Juli 2025**

Batas Pengumpulan Video  
**30 Juli 2025**

Pengumuman Pemenang  
**01 Agustus 2025**

**PENDAFTARAN GRATIS**

Total Hadiah  
**16,5 Juta**

**REGISTRASI**  
dppakbkab.jember.go.id

Barcode Scan Pendaftaran





BIDANG : DALDUK ADPIN				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			
	Kegiatan : Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB			
	Sub Kegiatan : Integrasi Pembangunan lintas sektor di kampung KB			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 560.000.000,-	Rp. 26.932.500,-	5
Outcome :				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Meningkatnya koordinasi dan sinergi lintas sektor</b> di tingkat desa/kelurahan dalam mendukung penguatan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana).</li> <li>2. <b>Meningkatnya partisipasi masyarakat</b> dalam pemanfaatan layanan program KB dan pembangunan keluarga, baik melalui kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R) maupun kegiatan lintas sektor.</li> <li>3. <b>Berjalannya fungsi Kampung KB secara optimal</b> sebagai wahana integrasi program pembangunan lintas sektor yang menysasar langsung keluarga dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan.</li> <li>4. <b>Terpetakannya desa/kelurahan prioritas</b> yang menjadi pusat pengembangan Kampung KB dan membutuhkan intervensi lebih intensif dalam peningkatan kualitas keluarga.</li> <li>5. <b>Meningkatnya cakupan layanan dasar</b> (kesehatan reproduksi, KB, gizi, pendidikan anak, keterampilan remaja, dan pemberdayaan ekonomi keluarga) bagi keluarga sasaran Kampung KB.</li> <li>6. <b>Adanya percepatan perbaikan kualitas hidup keluarga</b> melalui peningkatan ketahanan keluarga, penurunan angka kelahiran yang tidak direncanakan, serta peningkatan peran aktif keluarga dalam pembangunan.</li> </ol>				
Output :				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Terlaksananya pertemuan rutin/forum koordinasi Kampung KB</b> di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah, TP PKK, PLKB/PKB, kader kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R), serta lintas sektor terkait. Tertuang Dalam Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan di Uploud Di Website Kampung KB</li> <li>2. <b>Tersusunnya laporan perkembangan pelaksanaan program Kampung KB</b> per kecamatan, mencakup capaian program Bangga Kencana, kegiatan ketahanan keluarga, serta intervensi lintas sektor.</li> <li>3. <b>Pemetaan keluarga sasaran dan kelompok kegiatan Kampung KB</b> (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R, Posyandu, Posyandu Remaja) berbasis data SIGA dan sumber data lain yang relevan.</li> <li>4. <b>Identifikasi potensi, permasalahan, hambatan, dan solusi</b> dalam</li> </ol>				

	<p>pelaksanaan program Kampung KB di tiap desa/kelurahan</p> <p>5. <b>Evaluasi dan Rencana tindak lanjut (RTL) bulanan/tri wulan</b> yang disepakati lintas sektor untuk penguatan pelayanan KB, pembangunan keluarga, dan pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan RKM yang disusun.</p> <p>6. <b>Dokumentasi kegiatan Kampung KB</b>, baik berupa foto, video, maupun laporan naratif sebagai bahan monitoring dan evaluasi.</p> <p>7. <b>Pelaporan Website Kampung KB</b></p>
	<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>Pertemuan kampung KB dilakukan untuk mengevaluasi pelaporan website kampung KB dan dilaksanakan di 31 Kecamatan se-Kabupaten Jember</p> <p>Tempat : Balai KB 31 Kecamatan se-Kabupaten Jember</p> <p>Hari/Tanggal : 19 – 22 Mei 2025</p> <p>Peserta : 1197 orang dari 31 Kecamatan (Pengurus Pokja Kampung KB, Kader IMP dan Kader Sub IMP)</p> <p>Fasilitator : Koordinator Penyuluh KB</p>

Lampiran Foto Kegiatan Integrasi Pembangunan lintas sektor di kampung KB Kabupaten Jember (Bulan Mei 2025)





## 1. SIGA (Sistem Informasi Keluarga)



**Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN** adalah sebuah aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendukung pendataan keluarga, pemantauan, serta pengelolaan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana). Aplikasi ini hadir sebagai wujud transformasi digital dalam upaya meningkatkan kualitas data keluarga Indonesia secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses.

Melalui aplikasi SIGA, petugas lapangan, kader, maupun aparatur pemerintah dapat melakukan input, pembaruan, serta pelaporan data keluarga secara langsung menggunakan perangkat

digital. Hal ini meminimalisir hambatan yang biasanya timbul dari sistem manual, seperti keterlambatan pengumpulan data, risiko kehilangan arsip, atau kesulitan dalam penelusuran informasi.

SIGA tidak hanya berfungsi sebagai wadah penyimpanan data, tetapi juga sebagai alat analisis. Data yang terkumpul dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat untuk perencanaan program, pemetaan sasaran, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan begitu, program Bangga Kencana dapat dijalankan lebih tepat sasaran, khususnya dalam hal pelayanan KB, pembangunan keluarga, serta intervensi percepatan penurunan stunting.

Bagi masyarakat, keberadaan aplikasi SIGA memberikan manfaat berupa pelayanan yang lebih cepat dan terarah. Data yang telah terintegrasi memungkinkan keluarga memperoleh program bantuan maupun pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Sedangkan bagi pemerintah, SIGA menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendukung terwujudnya **Smart Governance** di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

## 2. Website Kampung KB



**Web Kampung KB** adalah sebuah platform digital yang dikembangkan untuk mendukung transparansi, promosi, serta pengelolaan informasi terkait program **Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)**. Kehadiran web ini menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah, kader, serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera.

Dalam web Kampung KB, berbagai informasi penting dapat diakses dengan mudah, mulai dari profil kampung, data kependudukan, kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, hingga capaian program Bangsa Kencana. Dengan desain yang sederhana dan mudah digunakan, web ini tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi, tetapi juga sebagai etalase digital yang memperlihatkan potensi serta inovasi yang dimiliki oleh setiap Kampung KB.

Selain itu, web Kampung KB memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat program-program pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, hingga upaya pencegahan stunting. Keberadaannya membantu kader dan pengelola Kampung KB dalam menyampaikan informasi secara lebih cepat, efisien, dan terintegrasi dengan sistem informasi BKKBN.

Bagi masyarakat, web ini menjadi sumber referensi yang terpercaya tentang layanan dan kegiatan Kampung KB di wilayahnya. Sedangkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, web Kampung KB berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi berbasis data yang mendukung kebijakan pembangunan keluarga. Dengan demikian, web Kampung KB bukan hanya media informasi, tetapi juga simbol komitmen menuju transformasi digital dalam memperkuat peran keluarga sebagai pondasi bangsa.

### 3. Web Rumah Dataku (Rumah Data Kependudukan dan Keluarga Berencana)



Web Rumah Dataku (Rumah Data Kependudukan dan Keluarga Berencana) adalah wadah digital yang dirancang untuk menampilkan, mengelola, dan mempublikasikan data hasil pendataan keluarga di tingkat desa atau kelurahan. Platform ini hadir sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat, pemerintah daerah,

maupun pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses data kependudukan dan program Bangga Kencana secara cepat dan akurat.

Rumah Dataku tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam proses perencanaan pembangunan berbasis data. Melalui web ini, dapat ditampilkan peta keluarga, profil penduduk, data kesehatan reproduksi, tingkat partisipasi KB, hingga indikator kesejahteraan keluarga. Informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menentukan intervensi program, termasuk upaya pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pembangunan keluarga berkualitas.

Dengan memanfaatkan Web Rumah Dataku, masyarakat dapat lebih memahami kondisi keluarganya sendiri dan lingkungan sekitar, sekaligus ikut berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan. Sementara bagi pemerintah, web ini mendukung terwujudnya tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sejalan dengan konsep Smart Governance dan transformasi digital BKKBN.

BIDANG : Pemberdayaan Perlindungan Perempuan				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 24.946.100,-	Rp. 23.917.500,-	95.9
	Outcome : jumlah masyarakat yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan perkawinan anak meningkat			
	Output : Peningkatan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan perkawinan anak			
	Pelaksanaan Kegiatan : 1. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak Tempat : Aula Kecamatan Ambulu Hari/Tanggal : Kamis, 15 Mei 2025 Jam : 08.00 WIB Peserta : 50 orang terdiri dari Ketua TP PKK Pokja 1 Kabupaten, 7 Kepala Desa, PKK Pokja I Desa 7 Orang dari masing-masing desa, Muslimat kecamatan 2 orang, Fatayat tingkat kecamatan 2 orang, Aisyiah tingkat Kecamatan 2 Orang, NU Kecamatan 1 orang, BPD 7 orang, Perwakilan pondok pesantren 7 orang, MUDin 7 orang, Ormas tingkat kecamatan 4 orang dan Bidang PPP DP3AKB 3 orang. Narasumber : Polres ( Unit PPA) dan Ketua MUI			

Notulensi ( laporan kegiatan )

1. Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi Pencegahan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perkawinan Anak Oleh Camat Ambulu dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain adanya data terpilah, pencegahan perkawinan anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, stop pekerja anak dan pentingnya pemberdayaan wirausaha kepada kelompok perempuan;
2. dilanjut dengan pemberian materi oleh Unit PPA POLRES Jember menyampaikan beberapa hal : Tindak Pidana Kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, Hak-hak korban kekerasan seksual, Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pencegahan kekerasan seksual, Kekerasan dalam rumah tangga, jenis KDRT, Ruang lingkup Rumah tangga Modus operandi KDRT, Tindak Pidana Pornografi, dampak dari pornografi, perlindungan hukum calon Pekerja migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Materi kedua disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Haris dalam materinya menyampaikan :
  - Tujuan perkawinan dalam islam, Persiapan sebelum perkawinan, pandangan islam dalam perkawinan anak, Kebijakan pemerintah, perkawinan beresiko, dampak perkawinan beresiko
  - Dalam Perkawinan baik catin laki-laki maupun catin perempuan harus mampu baik secara fisik, psikis, ekonomi, pendidikan dan sosial.
  - Apabila suatu perkawinan mendatangkan suatu mudorot ( masalah) sebaiknya jangan dilakukan karena sebenarnya hukum islam itu menjauhkan kemudorotan dan mendekatkan kebaikan.



## 2. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tempat : Aula Kecamatan Panti

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025

Jam : 08.00 WIB

Peserta : 50 orang terdiri dari Ketua TP PKK Pokja 1 Kabupaten, 7 Kepala Desa, PKK Pokja I Desa 7 Orang dari masing-masing desa, Muslimat kecamatan 2 orang, Fatayat tingkat kecamatan 2 orang, Aisyiah tingkat Kecamatan 2 Orang, NU Kecamatan 1 orang, BPD 7 orang, Perwakilan pondok pesantren 7 orang, MUDin 7 orang, Ormas tingkat kecamatan 4 orang dan Bidang PPP DP3AKB 3 orang.

Narasumber : Polres ( Unit PPA) dan Ketua MUI

1. Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi Pencegahan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perkawinan Anak Oleh Camat Panti dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain adanya data terpilah, pencegahan perkawinan anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. dilanjut dengan pemberian materi oleh Unit PPA POLRES Jember menyampaikan beberapa hal : Tindak Pidana Kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, Hak-hak korban kekerasan seksual, Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pencegahan kekerasan seksual, Kekerasan dalam rumah tangga, jenis KDRT, Ruang lingkup Rumah tangga Modus operandi KDRT, Tindak Pidana Pornografi, dampak dari pornografi, perlindungan hukum calon Pekerja migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Materi kedua disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Haris dalam materinya menyampaikan :

- Tujuan perkawinan dalam islam, Persiapan sebelum perkawinan, pandangan islam dalam perkawinan anak, Kebijakan pemerintah, perkawinan beresiko, dampak perkawinan beresiko
- Dalam Perkawinan baik catin laki-laki maupun catin perempuan harus mampu baik secara fisik, psikis, ekonomi, pendidikan dan sosial.
- Apabila suatu perkawinan mendatangkan suatu mudorot ( masalah) sebaiknya jangan dilakukan karena sebenarnya hukum islam itu menjauhkan kemudorotan dan mendekatkan kebaikan.



### 3. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tempat : Aula Kecamatan Jelbuk

Hari/Tanggal : Senin, 19 Mei 2025

Jam : 08.00 WIB

Peserta : 45 orang terdiri dari Ketua TP PKK Pokja 1 Kabupaten, 6 Kepala Desa , PKK Pokja I Desa 6 Orang dari masing-masing desa, Muslimat kecamatan 2 orang, Fatayat tingkat kecamatan 2 orang , Aisyiah tingkat Kecamatan 2 Orang, NU Kecamatan 1 orang, BPD 6 orang, Perwakilan pondok pesantren 6 orang, MUDin 6 orang, Ormas tingkat kecamatan 4 orang dan Bidang PPP DP3AKB 3 orang.

Narasumber : Polres ( Unit PPA) dan Anggota MUI

1. Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi Pencegahan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perkawinan Anak Oleh Camat Jelbuk dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain adanya data terpilah, pencegahan perkawinan anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, stop pekerja anak dan pentingnya pemberdayaan wirausaha kepada kelompok perempuan;
2. dilanjut dengan pemberian materi oleh Unit PPA POLRES Jember menyampaikan beberapa hal : Tindak Pidana Kekerasan seksual berdasarkan

UU TPKS, Hak-hak korban kekerasan seksual, Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pencegahan kekerasan seksual, Kekerasan dalam rumah tangga, jenis KDRT, Ruang lingkup Rumah tangga Modus operandi KDRT, Tindak Pidana Pornografi, dampak dari pornografi, perlindungan hukum calon Pekerja migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

3. Materi kedua disampaikan oleh Ustadz Fariz Kurnia dalam materinya menyampaikan :

- Tujuan perkawinan dalam islam, Persiapan sebelum perkawinan, pandangan islam dalam perkawinan anak, Kebijakan pemerintah, perkawinan beresiko, dampak perkawinan beresiko
- Dalam Perkawinan baik catin laki-laki maupun catin perempuan harus mampu baik secara fisik, psikis, ekonomi, pendidikan dan sosial.
- Apabila suatu perkawinan mendatangkan suatu mudorot ( masalah) sebaiknya jangan dilakukan karena sebenarnya hukum islam itu menjauhkan kemudorotan dan mendekatkan kebaikan.
- Apabila suatu perkawinan mendatangkan suatu mudorot ( masalah) sebaiknya jangan dilakukan karena sebenarnya hukum islam itu menjauhkan kemudorotan dan mendekatkan kebaikan.



4. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Tempat : Aula Kecamatan Puger

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025

Jam : 08.00 WIB

Peserta : 54 orang terdiri dari Ketua TP PKK Pokja 1 Kabupaten, 12 Kepala Desa, PKK Pokja I Desa 12 Orang dari masing-masing desa, Muslimat kecamatan

2 orang, Fatayat tingkat kecamatan 2 orang , Aisyiah tingkat Kecamatan 2 Orang, NU Kecamatan 1 orang, BPD 12 orang, Perwakilan pondok pesantren 3 orang, Mudin 12 orang, Ormas tingkat kecamatan 4 orang dan Bidang PPP DP3AKB 3 orang.

Narasumber : Polres ( Unit PPA) dan Anggota MUI

1. Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi Pencegahan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perkawinan Anak Oleh Camat Puger dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain pencegahan perkawinan anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak;
2. dilanjut dengan pemberian materi oleh Unit PPA POLRES Jember menyampaikan beberapa hal : Tindak Pidana Kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, Hak-hak korban kekerasan seksual, Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pencegahan kekerasan seksual, Kekerasan dalam rumah tangga, jenis KDRT, Ruang lingkup Rumah tangga Modus operandi KDRT, Tindak Pidana Pornografi, dampak dari pornografi, perlindungan hukum calon Pekerja migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Materi kedua disampaikan oleh Ustadz Zein dalam materinya menyampaikan :
  - Tujuan perkawinan dalam islam, Persiapan sebelum perkawinan, pandangan islam dalam perkawinan anak, Kebijakan pemerintah, perkawinan beresiko, dampak perkawinan beresiko
  - Dalam Perkawinan baik catin laki-laki maupun catin perempuan harus mampu baik secara fisik, psikis, ekonomi, pendidikan dan sosial.
  - Apabila suatu perkawinan mendatangkan suatu mudorot ( masalah) sebaiknya jangan dilakukan karena sebenarnya hukum islam itu menjauhkan kemudorotan dan mendekatkan kebaikan.



5. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak

<p>Tempat : Balai Desa Plalangan Kecamatan Kalisat ( TMMD)</p> <p>Hari/Tanggal : Rabu, 21 Mei 2025</p> <p>Jam : 08.00 WIB</p> <p>Peserta : 50 orang terdiri dari Ketua TP PKK Pokja 1 Kabupaten, Camat Kalisat, Ketua TP PKK Kecamatan Kalisat, TP PKK Pokja 1 Kecamatan , Kapolsek Kecamatan Kalisat, Danramil Kec. Kalisat, Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Kalisat, Ormas perempuan tingkat kecamatan, fatayat kecamatan, muslimat kecamatan, aisyiah kecamatan, ansor, kepala desa plalangan, Ketua TP PKK Desa Plalangan, TP PKK Pokja 1 Desa Plalangan, Perangkat Desa Plalangan, BPD, RT/RW Desa Plalangan, Kader Posyandu Desa Plalangan, Ormas Perempuan tingkat desa, Ormas tingkat desa, DP3AKB, Forum anak kalisat, forum anak desa plalangan, karangtaruna kecamatan kalisat, karang taruna desa plalangan dan genre kecamatan kalisat.</p> <p>Narasumber : Polres ( Unit PPA) dan Anggota MUI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi Pencegahan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perkawinan Anak Oleh Camat Kalisat dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain adanya data terpilah, pencegahan perkawinan anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak;</li> <li>2. dilanjut dengan pemberian materi oleh Unit PPA POLRES Jember menyampaikan beberapa hal : Tindak Pidana Kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, Hak-hak korban kekerasan seksual, Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pencegahan kekerasan seksual, Kekerasan dalam rumah tangga, jenis KDRT, Ruang lingkup Rumah tanggaModus operandi KDRT, Tindak Pidana Pornografi, dampak dari pornografi, perlindungan hukum calon Pekerja migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li> <li>3. Materi kedua disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Haris dalam materinya menyampaikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan perkawinan dalam islam, Persiapan sebelum perkawinan, pandangan islam dalam perkawinan anak, Kebijakan pemerintah, perkawinan beresiko, dampak perkawinan beresiko</li> <li>- Dalam Perkawinan baik catin laki-laki maupun catin perempuan harus mampu baik secara fisik, psikis, ekonomi, pendidikan dan sosial.</li> <li>- Apabila suatu perkawinan mendatangkan suatu mudorot ( masalah) sebaiknya jangan dilakukan karena sebenarnya hukum islam itu menjauhkan kemudorotan dan mendekatkan kebaikan.</li> </ul> </li> </ol>
---

- sebaiknya jangan dilakukan karena sebenarnya hukum islam itu menjauhkan kemudorotan dan mendekatkan kebaikan.



6. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan

Tempat : Aula DP3AKB

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2025

Jam : 15.00 WIB

Peserta : 31 orang terdiri dari Gojek Perempuan , Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan TP PKK Kabupaten.

Narasumber : Kabid Perlindungan Anak

- Materi yang disampaikan Memahami Kekerasan Berbasis Gender Online , memahami jenis kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS Memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Memahami Pencegahan perkawinan anak



## 7. Kegiatan Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak Dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Tempat : Aula DP3AKB

Hari/Tanggal : Jumat, 18 Juli 2025

Jam : 08.00 WIB

Peserta : 31 orang terdiri dari Lembaga Masyarakat, OPD, Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Bidang PPPA DP3AKB

Fasilitator : Kabid Perlindungan Anak

1. Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi Pencegahan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perkawinan Anak Oleh Bapak Kepala Dinas P3AKB dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain apresiasi kepada semua lembaga masyarakat atas pencapaian Penghargaan Pencegahan Perkawinan Anak Nomor 2 di Jawa Timur, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan perkawinan dan memberikan perlindungan perempuan.
2. dilanjutkan dengan koordinasi dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Mempertahankan kegiatan dan keberlanjutan Program pelayanan Dispensasi Kawin untuk ke depan tetap di lanjutkan;
  - b. Sinergi dan kolaborasi yang akan di lakukan oleh Dinas Kesehatan melalui puskesmas setempat atau bidan wilayah, khususnya untuk korban kekerasan seksual dan dispensasi kawin;
  - c. Para peserta undangan dapat mengetahui prosedur mengenai isbat nikah yg di lakukan oleh pasangan yg menikah siri;
  - d. Dinas kesehatan, Kementerian Agama dan Pengadilan agama juga akan kolaborasi mengenai edukasi kespro kepada catin yg telah menikah usia di bawah 19th dan
  - e. Membahas tentang asal usul anak dari kehamilan yang tidak diinginkan atau nikah sirri.



BIDANG : Pemberdayaan Perlindungan Perempuan				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	Kegiatan : Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 45.794.000,-	Rp. 45.678.000,-	99.7
	Outcome : jumlah masyarakat yang memahami pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan perkawinan anak meningkat			
	Output : Peningkatan peran serta stakeholder dan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pencegahan perkawinan anak dan terlayannya edukasi catin tentang bahaya perkawinan anak.			
	<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>1. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada perempuan</p> <p>Tempat : Pondok Pesantren Fatihul Ulum Manggis Tanggul</p> <p>Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Mei 2025</p> <p>Jam : 08.00 WIB</p> <p>Peserta : 58 orang terdiri 30 perwakilan Pondok Pesantren, 20 Madrasah di daerah tanggul, 5 orang dari bidang PPP dan 3 orang bidang PA DP3AKB.</p> <p>Narasumber : Ketua MUI, Kanit Unit PPA POLRES Jember dan Kemenag</p> <p>Notulensi ( laporan kegiatan )</p> <p>4. Sambutan dan Pembukaan Sosialisasi Pencegahan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perkawinan Anak Oleh Camat Ambulu dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain adanya data terpilah, pencegahan perkawinan anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, stop pekerja anak dan pentingnya pemberdayaan wirausaha kepada kelompok perempuan;</p> <p>5. dilanjut dengan pemberian materi oleh Unit PPA POLRES Jember menyampaikan beberapa hal : Tindak Pidana Kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, Hak-hak korban kekerasan seksual, Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pencegahan kekerasan seksual, Kekerasan dalam rumah tangga, jenis KDRT, Ruang lingkup Rumah tangga Modus operandi KDRT, Tindak Pidana</p>			

Pornografi, dampak dari pornografi, perlindungan hukum calon Pekerja migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

6. dilanjut dengan pemberiam materi dari kemenag, dalam materinya menyampaikan bahaya perkawinan anak dari segi agama dan peran KUA dalam pencegahan perkawinan anak
7. Materi kedua disampaikan oleh Dr. KH. Abdul Haris dalam materinya menyampaikan :
  - Tujuan perkawinan dalam islam, Persiapan sebelum perkawinan, pandangan islam dalam perkawinan anak, Kebijakan pemerintah, perkawinan beresiko, dampak perkawinan beresiko
  - Dalam Perkawinan baik catin laki-laki maupun catin perempuan harus mampu baik secara fisik, psikis, ekonomi, pendidikan dan sosial.
  - Apabila suatu perkawinan mendatangkan suatu mudorot ( masalah) sebaiknya jangan dilakukan karena sebenarnya hukum islam itu menjauhkan kemudorotan dan mendekatkan kebaikan.
  - Dilanjutkan diskusi dan tanya jawab



## 2. Kegiatan Dispensasi Kawin

Tempat : Aula DP3AKB

Hari/Tanggal : Setiap Senin dari bulan Januari sampai Juni 2025

Jam : 08.00 WIB

Peserta : Konseling 53 Pasang Catin Perempuan dan laki-laki

Narasumber : Psikolog dari HIMPSI

1. Layanan Assesmen dari DP3AKB, materi asesmen terkait keberlanjutan pendidikan, perekonomian keluarga dan bahaya perkawinan anak;
2. dilanjut dengan pemberian layanan psikolog .



BIDANG : Pemberdayaan Perlindungan Perempuan				
No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1	Program : PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
	Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Input : Jumlah Dana/Anggaran	Rp. 34.500.000,-	Rp. 33.860.000,-	98,14
	Outcome : jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus perempuan dan pelatihan manajemen kasus			
	Output : Meningkatnya jumlah SDM terlatih tentang pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus perempuan dan pelatihan manajemen kasus			
	<p>Pelaksanaan Kegiatan :</p> <p>1. Kegiatan Pelatihan Pencatatan Pelaporan Kasus Perempuan</p> <p>Tempat : Hotel Fortuna Grande</p> <p>Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025</p> <p>Jam : 08.00 WIB</p> <p>Peserta : 8 orang terdiri Lembaga Bantuan Hukum, Pekerja Sosial dan Bidang PPP dan UPTD PPA</p> <p>Narasumber : Bapak Kabid DP3AK Provinsi</p> <p>Notulensi ( laporan kegiatan )</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sambutan dan Pembukaan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus KTP, KTA, TPPO, ABH Oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain pentingnya pencatatan dan pelaporan bagi pengada layanan , Perlunya data terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Jember;</li> <li>• dilanjut dengan pemberian materi oleh DP3AK Propinsi adapun materi yang disampaikan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Materi SIMFONI : Peserta diajak untuk praktek menggunakan aplikasi simfoni. Adapun fungsi dari aplikasi simfoni untuk mencatat, melaporkan, dan memantau kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sistem ini berfungsi sebagai media pendataan, monitoring, dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak.</li> </ul> </li> </ul>			

b. Kebijakan data terpilah dan pencatatan dan pelaporan melalui siga : revitalisasi PUG, pengumpulan data terpilah melalui aplikasi, Tujuan dan Manfaat Membangun Data Terpilah, pembangunan responsif gender, jenis dna



## 2. Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus

Tempat : Hotel Fortuna Grande

Hari/Tanggal : Selasa -Rabu, 27-28 Mei 2025

Jam : 08.00 WIB

Peserta : 30 orang Perwakilan Pokja I TP PKK 30 Kecamatan

Narasumber : Kanit Unit PPA POLRES Jember, Psikolog Klinis UPTD PPA Provinsi dan Psikolog Forensik POLDA JATIM

3. Sambutan dan Pembukaan Pelatihan Manajemen Kasus Oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Jember dalam sambutannya menyampaikan Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak masih cukup tinggi, perlu pendekatan manajemen kasus dalam melakukan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. dilanjut dengan pemberian materi oleh Unit PPA POLRES menyampaikan beberapa hal antara lain : Tindak Pidana Kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, Hak-hak korban kekerasan seksual, Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pencegahan kekerasan seksual, Kekerasan dalam rumah tangga, jenis KDRT, Ruang lingkup Rumah tangga Modus operandi KDRT, Tindak Pidana Pornografi, dampak dari pornografi, perlindungan hukum calon Pekerja migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
5. diskusi Tanya jawab
6. Dilanjut dengan materi dukungan psikologi awal yang disampaikan oleh psikolog klinis UPTD PPA Provinsi dalam materinya menyampaikan : pengertian DPA, Tujuan DPA, Kondisi Krisis pada Kekerasan Perempuan dan Anak, pihak yang diperbolehkan memberikan DPA, Prinsip dasar DPA, 3 langkah DPA, mendengar aktif, melakukan rujukan dan studi kasus.
7. Dilanjut praktek dan Tanya jawab
8. Materi hari kedua tentang manajemen kasus disampaikan oleh psikolog forensic adapun materi yang disampaikan analisis situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan hasil sphpn (2016) dan snphar (2018), analisis situasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa pandemi, pengantar pentingnya layanan ppa, jenis kasus perlindungan , landasan teori sistem dalam perkembangan seorang anak dan perempuan, kerentanan, permasalahan dan dampak serta solusi bagi perempuan dan anak, strategi perlindungan perempuan

dan anak, tingkatan intervensi perlindungan perempuan dan anak, strategi perlindungan terhadap perempuan dan anak, pelayanan berbasis pada hak asasi manusia, pelayanan anak yang kokoh berdasarkan prinsip hak anak, cara melakukan assessment dan identifikasi kasus.

9. Dilanjutkan dengan tanya jawab



#### D. Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember berjumlah 86 orang, dengan jumlah 7 Program, 21 Kegiatan, dan 41 Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 31,873,363,102,- untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6

#### Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
Meningkatnya Masyarakat yang Setara	100%	100%	Efisien
Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	102%		
Meningkatnya Kualitas Keluarga	106%	98%	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Keluarga dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

#### E. Evaluasi Dan Analisis Penyebab Keberhasilan Dan Kegagalan

Analisis capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7  
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2025

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1 Meningkatnya Masyarakat yang Setara</b>						
Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	<b>100%</b>					
Rata rata capaian	<b>100%</b>					
<b>Sasaran 2 Meningkatnya Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</b>						
Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<b>102%</b>					
Rata rata capaian	<b>102%</b>					
<b>Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Keluarga</b>						
Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	<b>106 %</b>					
Rata rata Capaian	<b>106 %</b>					

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

### Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Masyarakat yang Setara dengan proyeksi tahun 2024

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran masyarakat yang setara mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 102 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKB dari pusat sangat membantu dalam keberhasilan pelayanan keluarga berencana. Jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) baru menunjukkan tren yang sangat dinamis dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah peserta baru tercatat sangat rendah, yakni hanya sebanyak 5.912 orang. Namun, terjadi lonjakan luar biasa pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022, dengan jumlah peserta baru meningkat drastis menjadi 55.551 orang. Meskipun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 48.323 orang, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Kemudian pada tahun 2024, tercatat peningkatan kembali dengan jumlah peserta KB baru mencapai 59.978 orang, mencatatkan angka tertinggi selama periode empat tahun ini. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program KB, serta peran aktif berbagai pihak dalam sosialisasi dan pelayanan KB. Diharapkan tren positif ini terus berlanjut demi mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera dan terencana.



Jika dilihat lebih rinci per kecamatan, peningkatan peserta KB baru dalam empat tahun terakhir menunjukkan peran aktif yang merata di berbagai wilayah. Beberapa kecamatan yang mencatat angka peserta KB baru tertinggi di tahun 2024 antara lain :

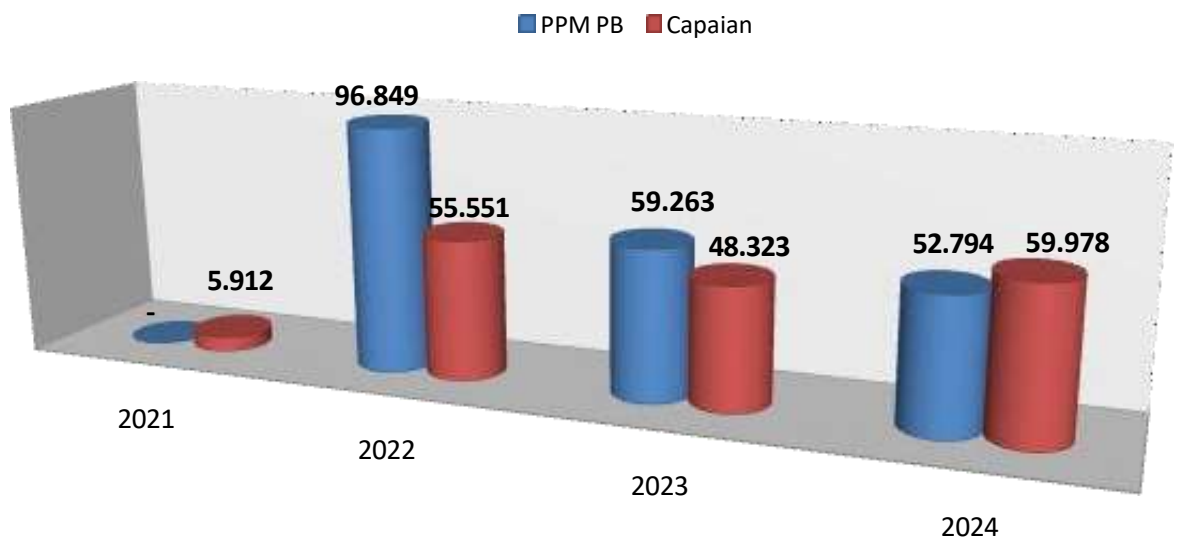
1. Mayang dengan 5.563 peserta,

2. Kaliwates sebanyak 4.120 peserta,
3. Tanggul dengan 3.493 peserta.
4. Jenggawah, 5. Sukorambi, dan
6. Silo juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Semboro, Panti, dan Pakusari masih menunjukkan angka yang relatif rendah jika dibandingkan kecamatan lainnya. Hal ini bisa menjadi perhatian untuk peningkatan edukasi dan pelayanan KB ke depan. Secara keseluruhan, tren positif ini menjadi cerminan keberhasilan program Keluarga Berencana di tingkat daerah, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan penyusunan strategi yang lebih efektif di masa mendatang.

Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi antara tenaga kesehatan, kader KB, serta dukungan dari masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pengendalian kelahiran untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ke depan, perlu dilakukan upaya lebih intensif dalam pemerataan pelayanan dan sosialisasi KB MOW, khususnya di wilayah yang belum terjangkau, guna mendukung program pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

## Proyeksi PB target dengan Capaian



Capaian target pelayanan dengan pencapaian di tahun 2024 naik secara signifikan. Hal ini merupakan pencapaian kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Kabupateh Jember dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Kendala Pelayanan Keluarga Berencana :

Data grafik menunjukkan bahwa jumlah peserta aktif mengalami tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, jumlah peserta aktif tercatat sebanyak 33.97 (kemungkinan dalam satuan persen atau ribuan, tergantung konteks yang belum tersedia). Kemudian pada tahun 2022, angka ini menurun menjadi 30.45, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 31.81. Meski terdapat sedikit kenaikan dari 2022 ke 2025, capaian tersebut belum berhasil mengembalikan angka ke posisi awal. Pada tahun 2024, jumlah peserta aktif kembali turun ke 30.78. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi



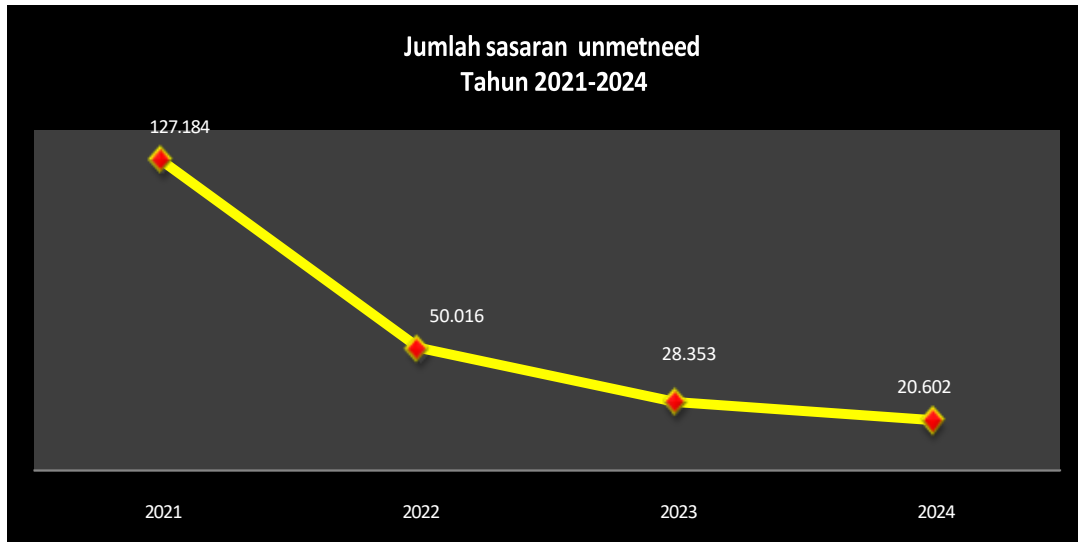
sedikit peningkatan pada tahun 2025, tren secara keseluruhan masih menunjukkan penurunan partisipasi aktif. Hal ini bisa menjadi sinyal untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi aktif, serta perlunya strategi yang lebih efektif dalam mempertahankan dan meningkatkan keaktifan peserta di tahun-tahun mendatang.

Solusi terhadap kendala kedepan adalah masih rendahnya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung program Bangga Kencana. Fenomena ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif di setiap kecamatan untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi aktif. Pemantauan berkala

dan evaluasi mendalam akan sangat penting untuk memahami penyebab turunnya capaian di beberapa wilayah serta mengidentifikasi praktik baik dari wilayah yang berhasil mempertahankan atau meningkatkan jumlah peserta aktif.

Data unmet need untuk pasangan usia subur yang tidak ingin memiliki anak lagi menunjukkan kebutuhan layanan KB jangka panjang atau permanen yang masih belum sepenuhnya terpenuhi di sejumlah wilayah Kabupaten Jember pada tahun 2024. Kecamatan Kaliwates mencatat jumlah tertinggi dengan 412 pasangan, disusul oleh Sumber Sari (381), Puger (362), Wuluhan (354), dan Ambulu (338). Tingginya angka ini menunjukkan masih banyaknya pasangan yang memerlukan akses terhadap metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Wilayah lain seperti Sumberbaru (306), Bangsalsari (260), dan Ajung (215) juga menampilkan angka signifikan. Ini memperkuat pentingnya perluasan layanan KB di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, kecamatan dengan angka paling rendah seperti Sumberjambe (21), Pakusari (23), Sukorambi (9), dan Jelbuk (8) tetap perlu dijangkau secara strategis agar kebutuhan layanan KB permanen tetap dapat tersampaikan dengan baik dan merata.

Kebutuhan yang belum terpenuhi (unmet need) untuk kategori 'ingin anak segera' di Kabupaten Jember tahun 2024 mencerminkan adanya kelompok pasangan usia subur yang berencana memiliki keturunan dalam waktu dekat, namun belum mendapatkan layanan yang sesuai.



Tingginya nilai unmetneed ini merupakan kendala yang harus di tangani dengan KIE pelayanan Keluarga Berencana di masyarakat Kabupaten.

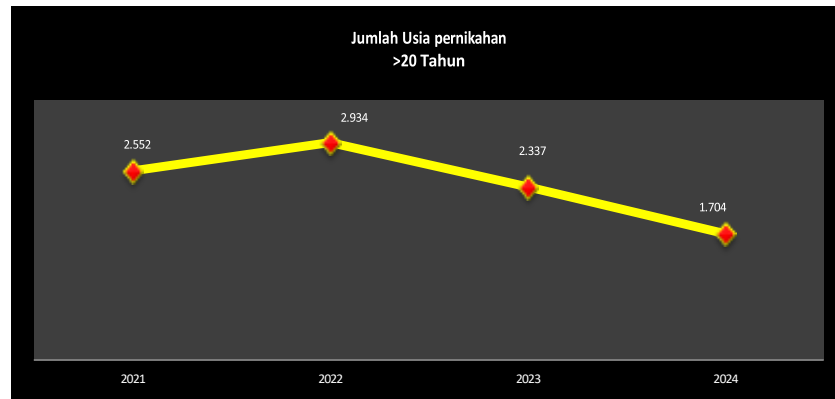
- Rencana perbaikan kedepan apa mengusulkan tambahan anggaran dari DAU untuk pelayanan keluarga berencana sehingga tidak tergantung pada anggaran pusat.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain penanganan keluarga berencana secara serentak.

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Keluarga**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Indeks Pembangunan Keluarga ( iBangga ) mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %.

- Penyebab keberhasilan antara lain dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOPPA dari pusat sangat membantu dalam keberhasilan pelayanan keluarga berencana. Selama empat tahun terakhir, angka pernikahan di wilayah ini menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 19.442 pernikahan, dan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 20.716 pasangan. Namun, tren ini mulai menurun di tahun-tahun berikutnya. Tahun 2023 mencatat penurunan menjadi 17.961 pernikahan, dan tren penurunan berlanjut pada tahun 2024 dengan total 17.046 pernikahan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan gaya hidup, faktor

ekonomi, hingga kesadaran masyarakat terhadap kesiapan menikah. Data ini penting sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan keluarga, termasuk edukasi pernikahan dan perencanaan keluarga berkelanjutan.



Tren pernikahan usia dini di Kabupaten Jember menunjukkan penurunan signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 2.552 kasus pernikahan yang terjadi di usia di bawah 20 tahun. Angka ini bahkan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan 2.934 kasus, yang menjadi titik tertinggi dalam periode tersebut.

Namun, setelah itu terjadi penurunan yang cukup tajam: 2.337 kasus di tahun 2025, dan pada tahun 2024, jumlahnya turun drastis menjadi hanya 1.704 kasus. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko pernikahan usia dini, serta peran aktif program edukasi dan advokasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.

Meski demikian, angka lebih dari seribu pernikahan dini di tahun 2024 masih menjadi sinyal bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Upaya kolaboratif perlu terus digencarkan, khususnya dalam edukasi kesehatan reproduksi, perlindungan anak, serta pemberdayaan remaja agar mereka memiliki pilihan dan masa depan yang lebih baik

Solusi terhadap kendala kedepan adalah masih rendahnya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung program Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan perempuan. tren mulai menunjukkan penurunan pada tahun 2025, dengan jumlah total turun menjadi

2.337 layanan. Penurunan ini berlanjut cukup tajam pada tahun 2024, dengan hanya 1.704 layanan yang tercatat, atau berkurang sekitar 42% dari tahun 2022.

Beberapa kecamatan yang mengalami penurunan drastis di tahun 2024 antara lain:

- **Sumberjambe**, dari 255 di 2022 menjadi hanya 118.
- **Puger**, dari 153 di 2022 menjadi 40.
- **Gumukmas**, dari 163 di 2025 turun ke 53 di 2024.
- **Tempurejo**, dari 176 di 2021 menjadi hanya 15 di tahun 2024.

Sebaliknya, ada kecamatan yang justru menunjukkan peningkatan atau konsistensi di tengah penurunan umum, seperti:

- **Mayang**, dari 103 di 2025 naik menjadi 112 di 2024.
- **Sumbersari**, dari 33 di 2025 meningkat menjadi 65.
- **Mumbulsari**, dari 57 menjadi 98.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan dinamika yang kompleks dan menjadi bahan evaluasi penting dalam perencanaan pelayanan di tahun-tahun mendatang. Diperlukan strategi yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan distribusi layanan tetap merata dan menjangkau masyarakat secara optimal, terutama di wilayah-wilayah yang menunjukkan penurunan signifikan.

- Rencana perbaikan kedepan apa mengusulkan tambahan anggaran dari DAU untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak sehingga tidak tergantung pada anggaran pusat.
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain penanganan perlindungan perempuan dan anak.

### **Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100 %,

- Penyebab keberhasilan antara lain dukungan anggaran dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOPPA dari pusat sangat membantu dalam keberhasilan pencapaian kinerja dengan baik.
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah masih rendahnya dukungan anggaran dari Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung program Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan perempuan.
- Rencana perbaikan kedepan mengusulkan tambahan anggaran dari DAU untuk pelayanan perlindungan perempuan dan anak mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat.

#### **F. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 31.873.363.102 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 29.731.875.732 terealisasi sebesar 93 %

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2025**

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PROSENTASE</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.308.913.621,00</b>	<b>3.419.491.809,00</b>	<b>41.15 %</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	6.932.798.226,00	2.973.658.374,00	<b>42.89 %</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.630.578.226,00	2.791.628.374,00	<b>42.10 %</b>
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	302.220.000,00	182.030.000,00	<b>60.23 %</b>
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	14.271.000,00	<b>0</b>	<b>-</b>
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian	14.271.000,00	0	<b>-</b>
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	394.095.260,00	97.739.564,00	<b>24.80 %</b>

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.223.860,00	66.214.594,00	<b>54.17 %</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.010.400,00	5.282.800,00	<b>4.76 %</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.861.000,00	26.242.170,00	<b>16.31 %</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	715.536.235,00	307.304.121,00	<b>42.95 %</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	170.028.235,00	58.104.121,00	<b>34.17 %</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	545.508.000,00	249.200.000,00	<b>45.68 %</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	252.212.900,00	40.789.750,00	<b>16.17 %</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.125.000,00	15.819.750,00	<b>25.88%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.446.900,00	24.970.000,00	<b>21.63 %</b>
<b>PROGRAM PENGARASUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	0,00	0,00	<b>0</b>
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	0,00	0,00	<b>0</b>
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0,00	0,00	<b>0</b>
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	0,00	0,00	<b>0</b>

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>700.800.000</b>	<b>101.574.989</b>	<b>14.4%</b>
<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>			
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			
<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota</b>	<b>700.800.000</b>	<b>101.574.989</b>	<b>14.4%</b>
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	208.800.000	24.075.000	3.43%
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	120.000.000	0	0%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	372.000.000	77.499.989	20.8%
<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>9.187.662.000</b>	<b>1.992.547.859</b>	<b>21.6%</b>
<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>1.560.425.000</b>	<b>587.730.000</b>	<b>37.6%</b>
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,000,000	49.870.000	49.9%
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi	435.240.000	155.978.000	35.8%

Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	775.155.000	438.155.000	56.5%
Pengendalian Program KKBPK	250.030.000	97.785.000	39.1%
<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>441.595.000</b>	<b>148.800.000</b>	<b>33.7%</b>
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-	-	0%
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	441.595.000	148.800.000	<b>33.7%</b>
<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.262.014.000</b>	<b>2.951.913.000</b>	<b>56.1%</b>
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.000.000	0	0%
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.157.830.000	2.938.513.000	57%
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	0	0%
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.184.000	13.400.000	23%
<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>1.923.628.000</b>	<b>75.832.500</b>	<b>3.9%</b>
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	560.000.000	75.832.500	13.5%
Pembinaan Terpadu Kampung KB	1.363.628.000	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>9,187,662,000</b>	<b>2,094,122,848</b>	<b>22.8%</b>

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>12.497.786.000</b>	<b>2.868.480.000</b>	<b>22.9%</b>
<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>12.497.786.000</b>	<b>2.868.480.000</b>	<b>22.9%</b>
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	126.000.000	0	0%
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	5.625.000.000	984.000.000	17.5%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.746.786.000	1.884.480.000	27.9%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>220.716.100</b>	<b>75.811.225</b>	<b>34.3%</b>
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>45.794.000</b>	<b>45.678.000</b>	<b>99.7%</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	45.794.000	45.678.000	99.7%
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>140.422.100</b>	<b>29.681.225</b>	<b>21.1%</b>
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.946.100	23.917.500,-	95.9%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115.476.000	50.030.163	43.3 %
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>34.500.000</b>	<b>33.860.000</b>	<b>98.1%</b>
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.500.000	33.860.000	98.1%
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>228.720.000</b>	<b>85.139.581</b>	<b>37.2%</b>
<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.794.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>6.7%</b>
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	55.794.000	3.770.000	6.7%
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>115.476.000</b>	<b>89.734.133</b>	<b>77.7%</b>
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	115.476.000	89.734.133	77.7%
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>57.450.000</b>	<b>38.260.000</b>	<b>66.6%</b>
Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	34,500,000	33.860.000,	98.1%
Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	22.950.000	19.800.000	86%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 2 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2025, sebanyak 2 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi.

#### **Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2025 adalah :**

1. Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKB dan BOPPA dari pusat sangat membantu dalam keberhasilan pelayanan keluarga berencana, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
2. Penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder sangat membantu dalam mencapai target dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia secara maksimal dengan tugas pokok dan fungsi yang telah di turunkan sampai dengan staf.

#### **Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :**

1. Tim TAPD menambah anggaran APBD untuk pelayanan KB dan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Penambahan SDM

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2026.

# Lampiran Pendukung



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur  
Telepon. (0331) - 422103, Faximile (0331) 422373  
Laman dppakb.jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HIMAWAN ABROR, S.Sos

Jabatan : JF. Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : Ors. MOH. DJAMIL, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Drs. MOH. DJAMIL, M.Si  
NIP. 19680924 198809 1 001

Jember, 17 September 2025

**Pihak Pertama**

**HIMAWAN ABROR, S.Sos**  
NIP. 19770630 200604 1012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan pengendalian keuangan dinas yang akuntabel	Persentase SPM yang dapat direalisasikan pembayarannya	100 % dari SPM yang diterima
2	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan analisa penyerapan anggaran di lingkung dinas dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan	Laporan Realisasi anggaran	12 Laporan

No.	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sumber dana
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.630.087.812,00	APBD
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	302.220.000,00	APBD
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.473.000,00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>7.401.780.812,00</b>	



**Pihak Kedua**  
Drs. MOH. DJAMIL, M.Si  
NIP. 19680924 198809 1 001

Jember, 17 September 2025

**Pihak Pertama**

**H,1(!::!R,S.??s**  
NIP. 19770630 200604 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur  
Telepon. (0331) - 422103, Faximile (0331) 422373  
Laman dppakb.jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUGENG RIYADI, SE  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : Ors. MOH. DJAMIL, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 17 September 2025

**Pihak Pertama**

SUGENG RIYADI, SE  
NIP. 197310302009011001



**Pihak Kedua**

Ors. MOH. DJAMIL, M.Si  
NIP. 19680924 198809 1 001

**KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN**  
**PEREMPUAN**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Peringkat Kabupaten Layak Anak	Jumlah Forum Anak Desa Dan Forum Anak Kecamatan  Jumlah Sekolah ramah Anak di tingkat SLTA dan SLTP	Minimal 80% Desa/Keluurahan dan 90% Kecamatan  Minimal 80% dari Sekolah negeri dan Swasta di Tingkat SLTP dan SLTA

No.	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sumber dana
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	54.740.000,00	APBD
2.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	375.000.200,00	APBD
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.520.200,00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>467.260.400,00</b>	



Drs. MOH. DJAMIL, M.Si  
 NIP. 19680924 198809 1 001

Jember, 17 September 2025

**Pihak Pertama**

SUGENG RIYADI, SE  
 NIP. 197310302009011001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur  
Telepon. (0331) - 422103, Faximile (0331) 422373  
Laman dppakb.jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIANA RUSPITA MALASARI, SKM**  
Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan KS  
Selanjutnya disebut pihak pertama :  
Nama : Ors. MOH. DJAMIL, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**Drs. MOH. DJAMIL, M.Si**  
NIP. 19690628 199303 1 006

Jember, 17 September 2025

**Pihak Pertama**

**DIANA RUSPITA MALASARI, SKM**  
NIP. 19851027 200902 2 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA  
SEJAHTERA**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perumusan pedoman teknis sesuai dengan ketentuan	100%
2		Persentase Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan ketentuan	100%
3	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Terlaksananya penguatan, pengembangan, koordinasi dan sinkronisasi sesuai dengan ketentuan	100%

No.	Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sumber dana
1.	Penyediaan Data dan Informasi Keluarg	1 20.000.000,00	80KB
2.	Pengendalian Program KKBPK	2 50.030.000,00	80KB
3.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Progra Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarva (Minilok)	435.240.000,00	80KB
4.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.000.000,00	80KB
5.	Peningkatan Kesertraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5.157.833.000,00	80KB
6.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.184.000,00	80KB
7.	Penyediaan Biaya Operasional, bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (8KB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	6.746.786.000,00	80KB
<b>JUMLA</b>			
		12.814.073.000,00	



Jember, 17 September 2025

**Pihak Pertama**

**DIANA RUSPITA\_MALASARI, SKM**  
NIP. 19851027 200902 2 008

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur  
Telepon. (0331)- 422103, Faximile (0331) 422373  
Laman dppakb.jemberkab.go.id



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG KEPENDUDUKAN DAN ADPIN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARI INDRA SUSENO, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Kependudukan adpin

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : Ors. MOH. DJAMIL, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**Drs. MOH. DJAMIL, M.Si**

NIP. 19690628 199303 1 006

Jember, 17 September 2025

**Pihak Pertama**

**ARI INDRA SUSENO, SE**

NIP. 198210292011 1007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI,  
PENGGERAKAN DAN INFORMASI**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase terlaksananya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta perumusan teknis sesuai dengan ketentuan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase pelaksanaan NSPK sesuai dengan ketentuan	100%
3	Meningkatnya Kualitas Keluarga	Persentase Pelaksanaan bimbingan teknis monitoring, pelaporan serta evaluasi dan penyediaan data sesuai dengan ketentuan	100%
4	Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan	100 %

No.	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sumber dana
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	208.800.000,00	80KB
2.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	372.000.000,00	80KB
3.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa KenCana	775.155.000,00	80KB
4.	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	BOKB
5.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	441.595.000,00	80KB
6.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	560.000.000,00	BOKB
7.	Pembinaan Terpadu Kampung KB	1.363.628.000,00	BOKB
8.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4.500.000.000,00	BOKB
<b>JUMLAH</b>		8.321.178.000,00	

Jember, 17 September 2025



**Drs. MOH. DJAMIL, M.Si**  
NIP. 19690628 199303 1 006

**ARI INDRA SUSENO, SE**  
NIP. 1982102920111007



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur  
Telepon. (0331) - 422103, Faximile (0331) 422373  
Laman dppakb.jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HERY APRILLIYANTO, ST**  
Jabatan : **ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : Ors. MOH. DJAMIL, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**Pihak Kedua**  
Ors. MOH. DJAMIL, M.Si  
NIP. 19690628 199303 1 006

Jember, 17 September 2025

**Pihak Pertama**

**HERY APRILLIYANTO, ST**  
NIP. 198204 11201001 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA**

<b>No</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Peringkat Kabupaten Layak Anak	Kegiatan Sosialisasi dan pembentukan Satuan Pendidikan Ramah Anak  Jumlah Sekolah ramah Anak di tingkat SLTA dan SLTP	Minimal 50 % dari Saluan pendidikan Selingkal SMP dan SMP Se kabupaten Jember  48 Kegiatan



**Pihak Kedua**

**Drs. MOH. DJAMIL, M.Si**

NIP. 19690628 199303 1 006

Jember, 17 September 2025

**Pihak Pertama**



**HERY APRILLIYANTO,ST**

NIP. 198204 11201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur  
Telepon. (0331) - 422103, Faximile (0331) 422373  
Laman dppakb.jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : Ors. MOH. DJAMIL, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

**Drs. MOH. DJAMIL, M.Si**  
NIP. 19690628 199303 1 006

Jember, 17 September 2025

Pihak Pertama

**dr. OKT VIA WAHYU KRISNA MURTI**  
NIP. 197710292007012008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN**  
**PEREMPUAN**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya peringkat Anugrah Parahita Ekapraya	Prosentase indeks pembangunan Gender	82,25 %

No.	Nama Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sumber dana
1.	Pengarustamaan Gender	0	APBD
2.	Perlindungan Perempuan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 220.716.100,00	APBD dan boppa
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 45.794.000,00	APBD/boppa
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 140.422.100,00	APBD/boppa
		Rp 34.500.000,00	APBD/boppa
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 220.716.100,00</b>	



Jember, 17 September 2025

Z;

**dr. Oktavia Wahyu\_Krisna Murti**  
 NIP. 19771029 200701 2 008

**I** PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**  
JM. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur  
Telepon. (0331) -- 422103, Faximile (0331) 422373  
Laman dppakb.jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ors. Moh. Djamil, **M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : Setijo Arlianto, **S.P.**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**  
  
**Ors. Moh. Djamil, M.Si**  
NIP. 19880924 198809 1 001

Jember, 17 September 2025

**Pihak Pertama**

  
**Setijo Arlianto, S.P.**  
NIP. 19720515 199803 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

No.	Nama Program I Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran {Rp.}	Sumber dana
1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14.271.000,00	APBD
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.223.860,00	APBD
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.010.400,00	APBD
4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.861.000,00	APBD
5.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	170.028.235,00	APBD
6.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	61.125.000,00	APBD
7.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	115.446.900,00	APBD
8.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.641.000,00	APBD
9.	Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	126.000.000,00	BOKB
<b>JUMLAH</b>		<b>956.607.395,00</b>	

Jember, 17 September 2025

**Pihak Kedua**



**Drs. Moh. Djamil, M.Si**  
NIP. 19680924 198809 1 001

**Pihak Pertama**



**Setijo Arlianto, S.P.**  
NIP. 19720515 199803 1 013

